

LAPORAN KINERJA INTERIM TW II 2025

BPOM DI TULANG BAWANG



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang berisi capaian kinerja selama Triwulan II Tahun 2025 yang diukur berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

Capaian Kinerja diukur dari 8 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan II Tahun 2025 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW II	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	115,45	●
2	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	105,56	●
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	119,16	●
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	271,43	●
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	-	-

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	100	
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	-	-
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	109,62	

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

- 1) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 115,45 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan II Tahun 2024 telah berjalan dengan baik
- 2) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 105,56 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini dikarenakan laboratorium Balai POM di Tulang Bawang telah berhasil mencapai target Standar Ruang lingkup, Kompetensi Personel, dan Peralatan laboratorium yang telah ditetapkan pada Triwulan I.
- 3) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 119,16 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Triwulan II Tahun 2024
- 4) Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 271,43 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini disebabkan karena tahapan pendampingan UMKM telah dilaksanakan pada tahap 2 dan tahap 4.

- 5) Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan target yang berpotensi dilakukan penindakan.
- 6) Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang telah berjalan dengan baik melalui pelaporan patroli siber dan profiling telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.
- 7) Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh belum memiliki capaian karena Nilai Indeks Pelayanan Publik akan dievaluasi Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan ke-4
- 8) Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 109,62 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, pada Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Resiko akan dievaluasi oleh pusat pada triwulan IV 2025.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.400.367.000 (pagu awal) / Rp 2.543.802.000 (pagu setelah *Blokir*). Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan II ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp1.182.568.538 (26,87 %) terhadap pagu awal atau (46,49 %) terhadap pagu setelah *Blokir*, dengan rincian sebagai berikut.

Balai POM di Tulang Bawang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Triwulan II Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Tulang Bawang Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja unit/Satuan Kerja dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAKIP Interim Triwulan II Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang. LAKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 ini tertuang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja yang mengacu pada Renstra Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025, evaluasi dan

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Interim Triwulan II Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Tulang Bawang pada triwulan selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tulang Bawang, 20 Juli 2025

Kepala Balai POM di Tulang Bawang



Rahmat Hidayat, S.Farm, Apt.,M.Pharm.Sci

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tulang Bawang pada tahun 2025. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Balai POM di Tulang Bawang perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Balai POM di Tulang Bawang diharapkan mampu menghadapi tantangan dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsillampung, yang berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2025 wilayah pengawasannya meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupatenllampung Utara dan Kabupaten Way Kanan

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Tulang Bawang Tahun 2025 memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan. Laporan Kinerja Balai POM di Tulang Bawang merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Tulang Bawang kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsillampung (Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupatenllampung Utara dan Kabupaten Way Kanan).

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas

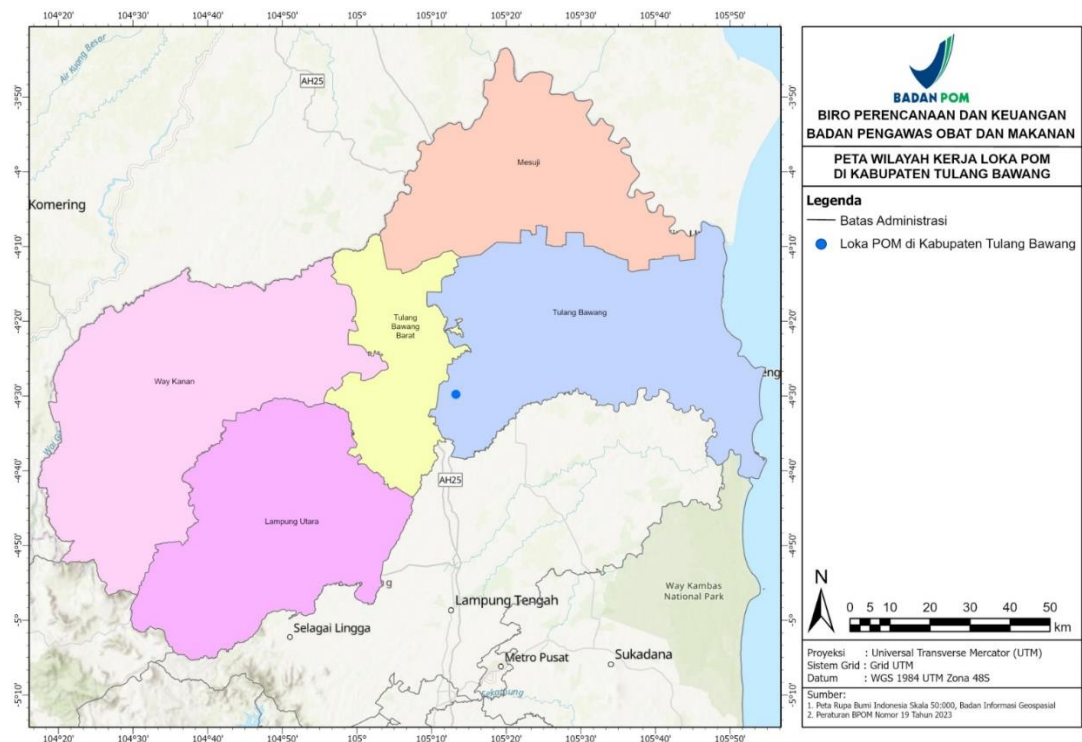
Obat dan Makanan, nomenklatur loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulang Bawang berubah nama menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tulang Bawang dengan wilayah pengawasan meliputi Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Ilampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.

Provinsi Ilampung memiliki peran strategis dan potensial sebagai “**pintu masuk**” Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis terletak pada kedudukan 105°45' Bujur Timur (BT) sampai 103° 48' BT, 3°45' sampai 6° lintang Selatan (LS), meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km², termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera dan dibatasi oleh :

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudra Indonesia di sebelah barat

Provinsi Ilampung memiliki 15 kabupaten/kota, dimana 10 kabupaten/kota merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Ilampung dan 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Ilampung Utara dan Kabupaten Way Kanan berdasarkan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

A. Luas Wilayah Kerja (km²)



Gambar 1. Iluas wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tulang

Bawang secara keseluruhan adalah 12.776,92

Luas wilayah pengawasan masing-masing Kabupaten/Kota pengawasan Balai POM di Tulang Bawang dijabarkan pada table berikut.

Tabel 1. Iluas wilayah masing-masing Kabupaten / Kota

No	Area	Luas(km ²)
1	Kabupaten Tulang Bawang	3.107,47
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1.281,45
3	Kabupaten Mesuji	2.200,51
4	Kabupaten Lampung Utara	2.656,39
5	Kabupaten Way Kanan	3.531,10
	Total	12.776,92

Wilayah Administratif

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan adalah 69 Kecamatan dan 833 Desa.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan dan Desa di masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Kecamatan	Desa
1	Kabupaten Tulang Bawang	15	151
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	9	103
3	Kabupaten Mesuji	7	105
4	Kabupaten Lampung Utara	23	247
5	Kabupaten Way Kanan	15	227
	Total	69	833

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tulang Bawang secara keseluruhan adalah 2.147,79 ribu jiwa.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Wilayah Pengawasan Balai POM di Tulang Bawang

No	Area	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1	Kabupaten Tulang Bawang	450,34
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	298,70
3	Kabupaten Mesuji	241,60
4	Kabupaten Lampung Utara	659,89
5	Kabupaten Way Kanan	497,26
	Total	2.147,79

Sumber : Data BPS 2024

Pola Transportasi dan Lama Waktu Perjalanan Dinas ke Wilayah Kerja

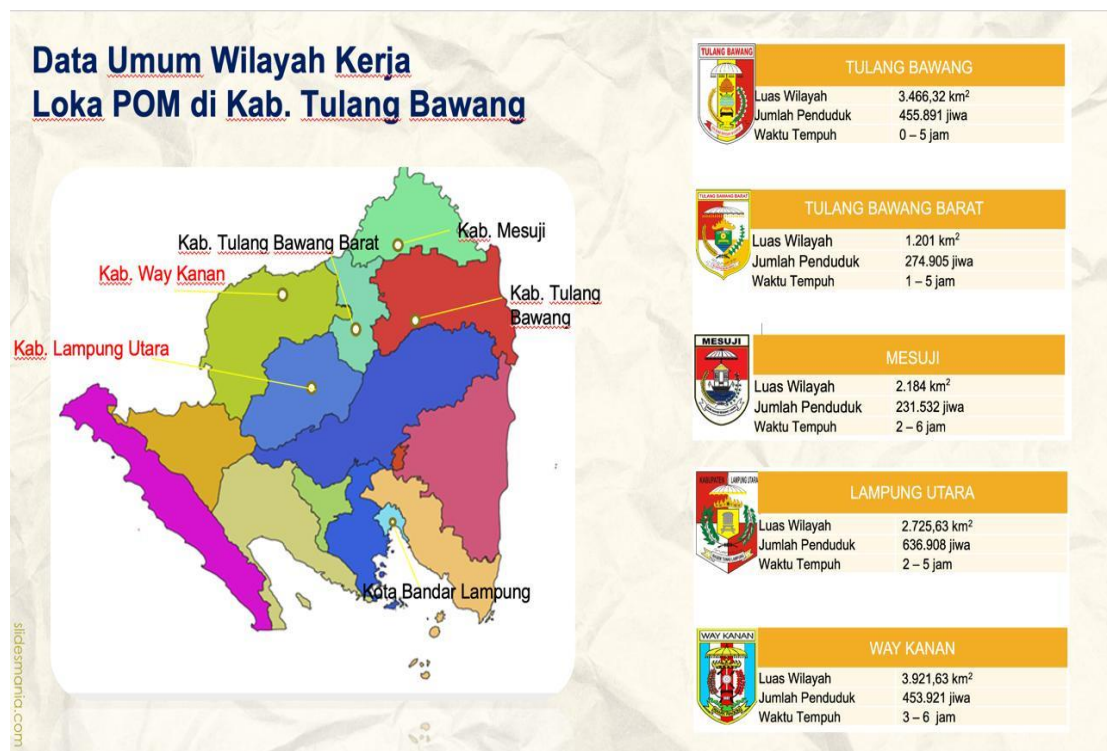
Seluruh wilayah kerja dapat dijangkau dengan transportasi darat (100%).

Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Berikut adalah rincian waktu yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja per Kabupaten dari Balai POM di Tulang Bawang.

Tabel 4. Waktu Tempuh Wilayah Pengawasan Balai POM di Tulang Bawang

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kabupaten Tulang Bawang	0-4
2	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1-2
3	Kabupaten Mesuji	2-6
4	Kabupaten Lampung Utara	3-4
5	Kabupaten Way Kanan	5-6



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai POM di Tulang Bawang

Balai POM di Tulang Bawang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Balai POM di Tulang Bawang harus memiliki strategi dalam pelaksanaan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar.

1.2.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

- Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
 29. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 30. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
 31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
 32. Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

1.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai POM di Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 103 Tahun 2025 tentang Pembinaan Kineja Pusat dan UPT pada Badan POM, maka Balai POM di Tulang Bawang adalah Unit Pelayanan Publik (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dipimpin oleh 1 orang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan secara teknis dibina oleh Deputi II serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Tulang Bawang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Balai POM di Tulang Bawang sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

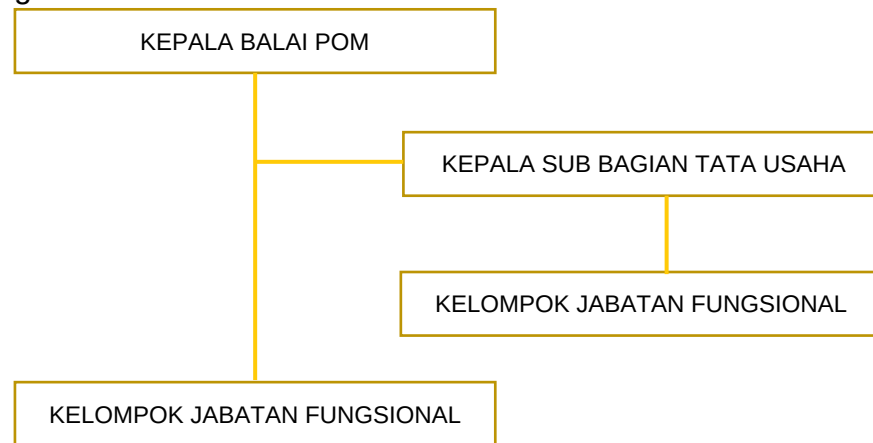
1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Cara Produksi Obat Tradisional Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk.
4. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Balai POM di Tulang Bawang sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM Kabupaten Tulang Bawang dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai POM di Tulang Bawang

Struktur organisasi dan tata kerja Balai POM di Tulang Bawang terdiri atas kepala UPT dan kelompok jabatan fungsional.

Koordinasi terkait kinerja pada Balai POM di Tulang Bawang langsung dipimpin oleh Kepala Balai sebagai koordinator setiap kegiatan dibantu oleh masing-masing kelompok jabatan fungsional.

1.4. ISU STRATEGIS

Tugas utama Balai POM di Tulang Bawang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Tulang Bawang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan

perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan merupakan Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, dimana Provinsi Lampung merupakan daerah tujuan wisata dan edukasi yang diminati dalam skala nasional. paling Selatan di Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk dari arah Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan wisatawan, percepatan arus informasi dan modal di Provinsi Lampung dan meningkatnya produk Obat dan Makanan yang beredar baik yang berasal dari negara lain maupun produk dalam negeri. Peredaran produk obat dan makanan secara daring yang semakin marak membuat pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Tulang Bawang harus lebih komprehensif mencakup peredaran produk obat dan makanan secara langsung dan peredaran secara daring. Hal ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Balai POM di Tulang Bawang dalam melakukan pengawasan.

Kabupaten Mesuji serta Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu jalur utama pintu masuk ke Provinsi Lampung melalui Provinsi Palembang juga harus mendapatkan perhatian khusus mengingat jalur transportasi produk obat dan makanan yang cukup intens berpeluang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang obat dan makanan.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan juga menuntut Balai POM di Tulang Bawang memiliki strategi khusus yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan registrasi namun juga tidak melupakan faktor keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang diproduksi.

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Tulang Bawang sebagai UPT BPOM dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Balai POM di Tulang Bawang juga perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

1.4.2 Isu Internal

Adapun isu internal di Balai POM di Tulang Bawang antaralain :

1. Kompetensi ASN yang belum memadai dan merata sehingga diperlukan pengembangan kompetensi seperti pelatihan terkait kegiatan rutin maupun tambahan.
2. Pemahaman mengenai aturan disiplin pegawai dan sanksi perlu diterapkan secara konsisten.
3. Kerjasama antar pegawai masih kurang sehingga perlu diadakan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama antar pegawai.
4. Sarana dan prasarana masih terbatas sehingga menghambat kinerja pegawai dalam mencapai sasaran strategis sehingga diperlukan penambahan sarana dan prasarana seperti pembangunan kantor loka, alat pengolahan data, ruang laboratorium, dan mobil fungsional.

1.4.3 Isu Eksternal

Adapun isu eksternal di Balai POM di Tulang Bawang antaralain :

1. Era digitalisasi dan globalisasi yang membawa kemudahan dalam memperoleh informasi dan banyaknya informasi yang tidak benar. Kurangnya literasi masyarakat sehingga cenderung langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan kebenarannya. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Balai POM di Tulang Bawang dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan untuk dapat memastikan produk obat dan makanan yang beredar aman, bermutu dan berkhasiat.

2. Penjualan online Obat dan Makanan yang semakin meningkat karena banyak pilihan produk dan harga yang lebih terjangkau yang dijual secara online atau daring. Hal ini merupakan salah satu penyebab maraknya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya beredar luas di masyarakat.
3. Kurangnya minat dan pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM karena sulitnya pemasaran dan pengiriman produk karena terkendala akses jalan yang kurang memadai.
4. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah memerlukan komitmen dan usaha yang kuat dari Balai POM di Tulang Bawang, Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, dan instansi pemerintah lainnya yang ada di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang.
5. Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Balai POM di Tulang Bawang dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Balai POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan pengawasan.
6. Maraknya perdagangan Obat dan Makanan secara online sehingga diperlukan peningkatan kompetensi di bidang teknologi dan penyebaran informasi yang lebih luas oleh pegawai Balai POM di Tulang Bawang.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Tulang Bawang, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tulang Bawang.

Pada analisa SWOT tersebut ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

1.4.4 Analisa lingkungan Strategis

Hasil analisa Lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

Tabel 5. Hasil Analisis SWOT Balai POM di Tulang Bawang

Kekuatan		Kelemahan	
1.	Pegawai yang mengedepankan prinsip solid, loyal, tangguh, pantang menyerah	1.	Kurangnya orientasi pelayanan kepada masyarakat
2.	Kompetensi pegawai pada bidang yang ditugaskan sudah sesuai	2.	Jumlah pegawai yang belum memadai
3.	Suasana kerja yang harmonis	3.	Sarana dan prasarana belum memadai (kantor, mobil operasional, laboratorium, dan alat pengolah data)
4.	Kerjasama antar pegawai yang baik	4.	Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengujian masih belum memadai

Kekuatan		Kelemahan	
5.	Disiplin dalam melakukan pelaporan dan kegiatan	5.	Komunikasi dan keterbukaan informasi dalam organisasi perlu ditingkatkan
6.	Loyal terhadap organisasi (BPOM)	6.	Perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai
7.	Pegawai dapat mengerjakan beberapa kegiatan sekaligus (multitasking)	7.	Sulitnya kondisi jalan dalam melaksanakan kegiatan
8.	Struktur organisasi yang baik		
9.	Disiplin ilmu yang beragam dari seluruh pegawai		
10.	Pegawai mampu bekerjallintas fungsi		
11.	Sebagian besar merupakan pegawai milenial yang memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki berbagai inovasi baru		
12.	Pimpinan dan seluruh pegawai Balai POM di Tulang Bawang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan prima seperti yang tercantum di dalam Maklumat Pelayanan yang telah diumumkan kepada masyarakat		
13.	Balai POM di Tulang Bawang berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder terkait		
14.	Balai POM di Tulang Bawang merespon informasi dan pengaduan secara cepat		

Kekuatan		Kelemahan
15.	Seluruh pegawai telah melakukan pengembangan kompetensi secara teratur	

Peluang		Tantangan	
1.	Membantu memberikan solusi terhadap proses pengurusan izin BPOM	1.	Regulasi yang sering berubah
2.	Memiliki koordinasi yang baik dengan semua stakeholder	2.	Aplikasi perizinan yang sering terjadi gangguan atau tidak dapat digunakan
3.	Memiliki inovasi dalam pelaksanaan kegiatan	3.	Jumlah sarana obat dan makanan yang semakin banyak
4.	Melakukan pengusulan penambahan pegawai untuk mengoptimalkan kegiatan	4.	Jarak sarana yang jauh dan kondisi jalan yang rusak
5.	Peningkatan kompetensi dan pengembangan diri	5.	Keterbatasan pegawai atau pesonel
6.	Memperluas koordinasi dengan stakeholder	6.	Kurangnya kesadaran masyarakat
7.	Penciptaan lingkungan kerja yang harmonis		
8.	Tersedia bebrbagai media dalam kegiatan KIE		

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Balai POM di Tulang Bawang perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kompetensi pegawai serta berkolaborasi dengan stakeholder;
2. Meningkatkan koordinasi dengan unit pengampu untuk penyediaan anggaran guna pemenuhan sarpras dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasamallintas sektor untuk membangun kesadaran masyarakat terkait keamanan obat dan makanan;
4. Peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti kegiatan terpadu dan/atau kegiatanllain yang mendukung kompetensi petugas baik secaralluring maupun daring.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai POM di Tulang Bawang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara

2.1.1 VISI

Sejalan dengan visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Maka berdasarkan hal tersebut, Visi yang diusung BPOM untuk RPJMN 2025-2029 adalah: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Mengacu pada Visi BPOM tersebut, maka Balai POM di Tulang Bawang menetapkan visi pada tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

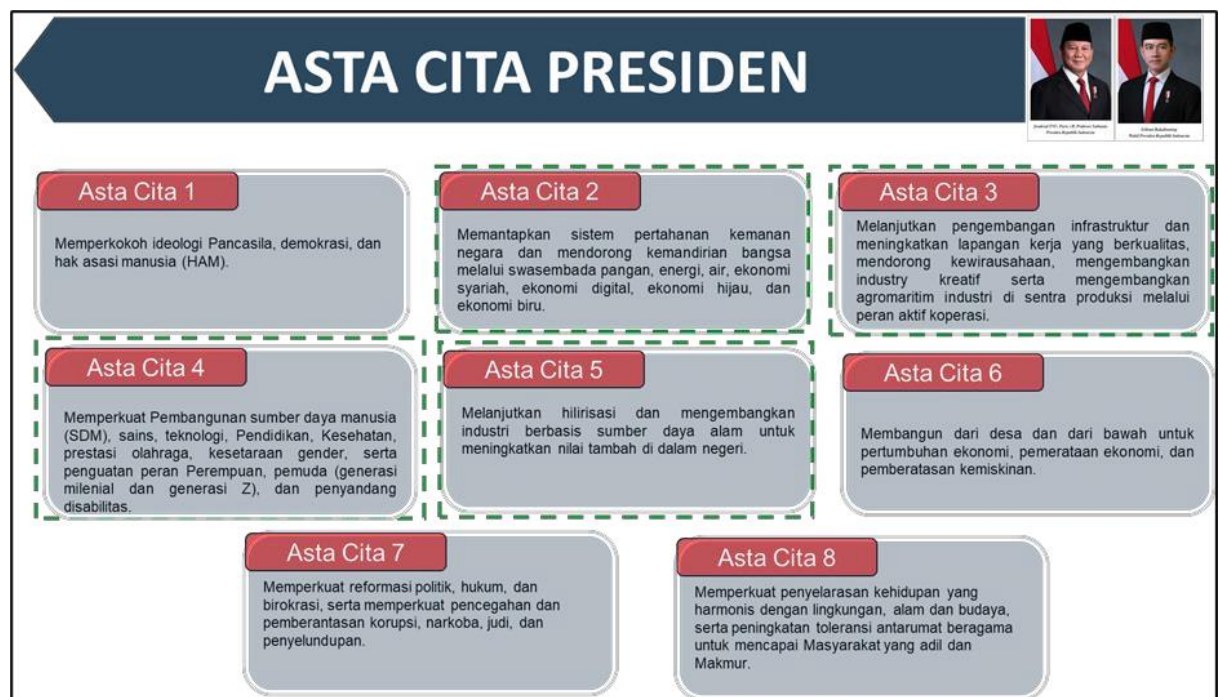
Visi untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL). BPOM

berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadilangkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

2.1.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan serta mendukung misi presiden terpilih 2025-2029 yang disebut dengan Asta Cita Presiden, sebagai berikut



Gambar 4. Asta Cita Presiden

Dalam Asta Cita Presiden, BPOM RI mendukung Asta Cita 2,3,4 dan 5. Sehingga untuk mendukung misi dan mewujudkan visi dari BPOM RI, Misi BPOM RI pada periode RPJMN 2025-2029, yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

2.1.3 TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasilingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien sertallayanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikanllayanan publik yang prima.

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapaiBalai POM di Tulang Bawang dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029), diharapkanBalai POM di Tulang Bawang akan dapat mencapai sasaran strategis dalam upaya menjamin keamanan, kualitas, kemandirian pada sektor obat dan makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitasllaboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agarlllebih responsif

dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasamallintas sektor dan optimalisasi koordinasi antarll lembaga dimaksudkan untuk menciptakanllingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Menguatnya kapasitasllaboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitasllaboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan danllaboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitasllaboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.
3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.
4. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agarlllebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.
5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak

tegas pelaku kejahatan di sektor obat dan makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. Layanan Publik BPOM yang Prima: Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.
7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif: Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*	0
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100%
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%
5	Menguatnya lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,4

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80%
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	58%
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 laporan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	76,15
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,75
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja Balai POM di Tulang Bawang seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Tulang Bawang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5 %
		Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,68 %
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	100 %

		ketentuan	
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75 %
		Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2 %
2	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	11
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM	86,16

	di Tulang Bawang	di Tulang Bawang	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 %
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	80 %
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %

7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang	4,05
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	77,22
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	4
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	2,9
		Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang	100 %

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 8. RAPK Balai POM di Tulang Bawang

DAFTAR INDIKATOR KINERJA/ TAHUN	TARGET	B03	B06	B09	B12
Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	75	75	75	75
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	85	85	85	85
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,6	15	30	45	89,6
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100

DAFTAR INDIKATOR KINERJA/ TAHUN	TARGET	B03	B06	B09	B12
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
Nilai pemenuhanllab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuanllaboratorium	11	8	9	10	11
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	0%	45%	65%	2
Jumlah desa pangan aman	1	0%	49%	71%	1
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0%	70%	100%	1
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	15	35	60	91,0
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85			15	85
Persentasellaporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	50	50	90
Indeks Pelayanan Publik	4,05				4,05
Nilai AKIP	77,22				77,2
Nilai Kinerja Anggaran	4				4
Indeks Manajemen Risiko	2,9				2,9
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	25	50	75	100

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja unit/Satuan Kerja dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

kategori yang digunakan pada capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Kriteria Capaian Indikator Kinerja dan NPS dan Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Balai POM di Tulang Bawang guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan. Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang telah berhasil mencapai 3 Sasaran Strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, 2 Sasaran Strategis dengan kriteria “Sangat Baik”, 1 Sasaran Strategis dengan kriteria “Baik”, dan 2 Sasaran strategis belum dapat dinilai capaian kinerjanya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sepuluh Sasaran Strategis yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW II	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	115,45	●
2	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	105,56	●
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	119,16	●

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	271,43	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	-	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	100	
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	-	-
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	109,62	

Analisis Capaian Kinerja Triwulan I

Pada Rencana Kinerja Balai POM di Tulang Bawang tahun 2025 telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran kegiatan tersebut ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut.

*Tabel 10. Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Tulang Bawang
Triwulan II Tahun 2025*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM	Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	95,87	122,13	

	di Tulang Bawang	Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-
		Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,8	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	35,14	117,13	
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	100	0	
		Persentase sarana produksi pangan	85	100	117,65	

		olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	101,80	116,01	
		Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91,92	108,14	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					115,45	
2	Menguatnyallaboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Nilai pemenuhanllaboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuanllabora	9	9,5	105,7	

		torium				
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					105,7	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	95,59	110,95	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	45	75	166,67	
		Jumlah desa pangan aman	75	75	100	
		Jumlah pasar panga naman berbasis komunitas	75	75	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3					119,16	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan	35	95	271,43	

		olahan				
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4					271,43	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	0	0	0	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5					-	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6					100	
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7					-	-
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit	Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

	Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	Indeks Manajemen Risiko Balai POM	-	-	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi RB	54,81	54,81	109,62	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8					109,62	

Dari 23 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 8 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”, 2 indikator kinerja dengan kriteria capaian “Sangat Baik”, 1 indikator kinerja dengan kategori capaian “Baik”, 1 indikator kinerja dengan kategori “Kurang”, dan 11 indikator kinerja belum dapat dihitung capaian kinerjanya.

3.1.1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	95,87	122,13	
		Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	
		Persentase sampel KLB	100	-	-	-

	keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT				
	Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,8	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	35,14	117,13	
	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi	87,75	101,80	116,01	

		yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91,92	108,14	●
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	●
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					115,45	●

Sasaran kegiatan 1 yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang terdiri dari 10 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase sampel sediaan farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dengan rumus = $(A + B + C + D)/4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d$

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Rentan kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring)),
3. Rentan Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 30 %)

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Rentan periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 30 %)

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Balai POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- d. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)
- $$10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e+f)/6$

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$
- e. akurasi dalam penentuan kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d)/4$

- a. pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- b. kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = $(\text{Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling} / \text{Target sampel yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

d. ketepatan dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

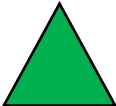
Tabel 11. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kriteria
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	95,87	122,13	

Nilai Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di pada Triwulan II adalah 95,87 % dengan capaian kinerja 122,13 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “ Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target 2025

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	95,87	122,13	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II memiliki capaian 122,13 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan serta ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengambilan sampel atau sampling dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sampel di wilayah pengawasan dengan kriteria sesuai dengan pedoman sampling dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan pada TW II dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2025 sebanyak 72 sampel, terdiri dari 22 sampel obat, 13 sampel obat bahan alam, 7 sampel suplemen kesehatan, 2 sampel obat kuasi, dan 28 sampel kosmetik.

Capaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 122,13%. Kegiatan pengambilan sampling dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan pedoman sampling dan tetap berkoordinasi dengan UPT BPOM lain untuk keperluan pengujian. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengambilan sampling, hasil uji, dan kesesuaian penandaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta pelaksanaan tindak lanjut terhadap surat perintah terhadap produk yang diberikan oleh BPOM. Dari beberapa hal yang dilaksanakan terdapat beberapa hal yang belum maksimal yaitu

- Pelaksanaan tindak lanjut terhadap surat perintah terhadap produk yang diberikan oleh BPOM terutama pada produk Obat bahan Alam

dimana dari 21 surat baru 13 surat yang dilakukan tindak lanjut hal ini dikarenakan ada beberapa surat yang baru masuk pada bulan juni, perencanaan kegiatan tindak lanjut yang belum maksimal, dan monitoring yang belum maksimal, sehingga untuk TW selanjutnya akan dimaksimalkan lagi untuk percepatan pelaksanaan Tindak lanjut dan juga melaksanakan tindak lanjut secara rutin bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan sarana

- Ada beberapa sampel terutama Obat bahan Alam dan Suplemen Kesehatan belum mencapai 50% dari target tahunan, dimana hal ini dikarenakan baru direlaksasi nya anggaran pelaksanaan kegiatan pada TW II, sehingga pada Triwulan II harus memenuhi kekurangan sampel pada TW I (pada saat anggaran di blokir). Untuk Triwulan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target serta pelaksanaan sampling sesuai target yang telah ditetapkan sehingga minimal pada Triwulan III mencapai 75 persen dari jumlah sampel yang harus disampling.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan capaian sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi berisiko adalah:

1. Pelaksanaan sampling produk sediaan farmasi yang dilaksanakan rutin sampai dengan TW 2, telah dilakukan sampling sebanyak 72 sampel dari 155 target sampel tahun 2025
2. Pelaksanaan koordinasi bersama Regional laboratorium Pekanbaru yang dilaksanakan rutin setiap bulannya meliputi pengisian data perencanaan dan realisasi, rapat rutin triwulan bersama anggota regional, konsultasi dengan PIC sampel sediaan farmasi dari masing-masing anggota Regional laboratorium
3. Pengiriman sampel ke Balai Penguji yaitu ke Balai Besar POM di Pekanbaru sebanyak 5 (lima) sampel, Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 3 (tiga), Balai Besar POM di Palembang

sebanyak 2 (dua) sampel, Balai POM di Jambi sebanyak 3 (tiga) sampel, Balai POM di Pangkal Pinang sebanyak 1 (satu) sampel, Balai POM di Tulang Bawang sebanyak 7 (tujuh) sampel, P3OMN sebanyak 1 (satu) sampel.

4. monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling secara rutin setiap bulan antara perencanaan dan realisasi. Pada bulan Mei terdapat sampel kasus yang dilakukan pengambilan sampel lebih awal dikarenakan dicurigai oleh petugas mengandung bahan berbahaya. Sehingga sampel yang tersampling pada bulan Mei melebihi target sampel sejumlah 1 (satu) sampel.
5. melakukan pembersihan pasar terhadap produk yang ditarik dan memberikan surat tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan oleh BPOM.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi dari BPOM untuk menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam mengambil kesimpulan untuk kegiatan sampling yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya sehingga target sampling dapat dicapai.
7. Melakukan monitoring ketepatan waktu pelaporan pada SIPT dimana dari semua sampel yang telah disampling pada Triwulan II telah diinput tepat waktu

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 13 . Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	423,82	422,82	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh nilai 422,82 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target tetapi masih terdapat beberapa variabel penilaian yang masih bisa ditingkatkan seperti pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi dari Deputi Badan POM, sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya masih bisa dilakukan peningkatan kinerja dengan pelaksanaan beberapa rekomendasi kegiatan, seperti peningkatan serapan anggaran, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pusat

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Telah dilakukan sampling komoditi kosmetik dan suplemen kesehatan dimulai pada bulan April.

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 14. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kondisi awal	Rekomenda si	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Pada bulan Januari komoditi sampel kosmetik dan suplemen kesehatan belum dilakukan sampling	Melakukan sampling komoditi kosmetik dan suplemen kesehatan	Juni	Telah dilakukan sampling komoditi kosmetik dan suplemen kesehatan dimulai pada bulan April	-	-	Sampel seluruh komoditi sediaan farmasi telah tersampling
Pelaporan pembersihan pasar pada komoditi oba dan sk belum dilakukan pelaporan sejumlah 8 surat	Melakukan pengecekan produk yang dilakukan penarikan BPOM RI bersamaan dengan pemeriksaan rutin sarana distribusi	September	-	Dalam tahap melaksanakan tindak lanjut produk yang ditarik oleh BPOM	September	-
Belum dilakukan monitoring perencanaan dan realisasi sampling	Menyampaika n dan mendokument asikan perencanaan sampling serta realisasi pada TW berikutnya	Juli	-	Sampling telah dilakukan perencanaan, tetapi belum terdapat monitoring realisasi ketercapaian tiap periode	Juli	-

2. Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antaralain :

1. Tindak lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A1 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/label tidak

mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak lanjut sesuai Pedoman Tindak lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

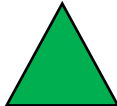
Target TW II	Realisasi s.d Bulan Juni	%Capaian	Kategori Capaian	Kriteria
75	100	133.33	Tidak Dapat Disimpulkan	

Nilai Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 100 % dengan capaian kinerja 133,33 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II memiliki capaian 133,33 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun depan dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengambilan sampel atau sampling dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sampel di wilayah pengawasan dengan

kriteria sesuai dengan pedoman sampling dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan pada TW II dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2025 sebanyak 41 sampel. Pada Triwulan II telah dilakukan sampling sebanyak 41 sampel dimana kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan pada TW II dimulai dari bulan April 2025 sebanyak 15 (lima belas) sampel, Mei 2025 sebanyak 11 (sebelas) sampel dan Juni 2025 sebanyak 12 (dua belas) sampel.

Capaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 133,33%. Kegiatan pengambilan sampling dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan pedoman sampling dan tetap berkoordinasi dengan UPT BPOM lain untuk keperluan pengujian. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengambilan sampling, hasil uji, dan kesesuaian penandaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan capaian dikarenakan kesesuaian pelaksanaan sampling dengan kategori yang ditetapkan sesuai pedoman sampling, sehingga akan dilakukan monitoring agar pada triwulan selanjutnya kesesuaian sampel dengan POA tercapai. Kesesuaian pelaporan sampling melalui SIPT sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, akan dimonitoring secara berkala. Serta akan melakukan tindak lanjut terhadap hasil uji sampel TMS jika ada, sesuai dengan ketentuan agar capaian triwulan selanjutnya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari beberapa hal yang dilaksanakan terdapat beberapa hal yang belum maksimal yaitu kesalahan petugas dalam melakukan penginputan sampel pada SIPT, seharusnya dipilih kategori pangan krim kental manis tetapi petugas memilih susu kental manis hal ini mengakibatkan verifikasi IHHU sampel tidak dapat dilakukan oleh petugas pengujian. Petugas melaporkan kendala pada itsm dan selanjutnya melakukan revisi terhadap kategori pangan sampel sesuai dengan kategori sampelnya. Untuk

selanjutnya petugas melakukan monitoring terhadap kesesuaian kategori sampel.

Kegiatan pengambilan sampling akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan pedoman sampling dan tetap berkoordinasi dengan UPT BPOM lain untuk keperluan pengujian. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengambilan sampling, hasil uji, dan kesesuaian penandaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan capaian sampling dan pengujian sampel pangan olahan berisiko adalah:

1. Pelaksanaan sampling produk pangan olahan yang dilaksanakan rutin sampai dengan TW 2, telah dilakukan sampling sebanyak 41 sampel dari 118 target sampel tahun 2025
2. Pelaksanaan koordinasi bersama Regionallaboratorium Pekanbaru yang dilaksanakan rutin setiap bulannya meliputi pengisian data perencanaan dan realisasi, rapat rutin triwulan bersama anggota regional, konsultasi dengan PIC sampel pangan dari masing-masing anggota Regionallaboratorium
3. Pengiriman sampel sampai dengan TW II ke Balai Penguji yaitu ke Balai Besar POM di Pekanbaru sebanyak 0 (nol) sampel, Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 41 (empat puluh satu), Balai Besar POM di Palembang sebanyak 3 (tiga) sampel, Balai POM di Jambi sebanyak 1 (satu) sampel, Balai POM di Pangkal Pinang sebanyak 1 (satu) sampel
4. monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling secara rutin setiap bulan antara perencanaan dan realisasi.
5. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil uji sampel yang Tidak memenuhi syarat.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi dari BPOM untuk menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam mengambil kesimpulan untuk kegiatan sampling yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya sehingga target sampling dapat dicapai.
7. Melakukan monitoring ketepatan waktu pelaporan pada SIPT dimana dari semua sampel yang telah di sampling pada Triwulan II telah diinput tepat waktu

e. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 17. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	530,32	529,32	75% Tidak Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh nilai 529,32 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target tetapi masih terdapat beberapa variabel penilaian yang masih bisa ditingkatkan seperti pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi dari Deputi Badan POM,

sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya masih bisa dilakukan peningkatan kinerja dengan pelaksanaan beberapa rekomendasi kegiatan, seperti peningkatan serapan anggaran

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 18. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Target IKU telah tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling	Juni 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi dimulai pada bulan April	-	-	Seluruh sampel pangan olahan tersampling sesuai POA sampel pangan olahan
Akan dilakukan monitoring perencanaan dan realisasi sampling	Menyampaikan dan mendokumentasikan perencanaan sampling serta realisasi pada TW berikutnya	September 2025	-	Sampling telah dilakukan sesuai perencanaan, tetapi belum terdapat monitoring realisasi ketercapaian tiap periode	-	-

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita

sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan,
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b) Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- c) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT

atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait,

- d) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

- e) Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayahloka akan menjadi kinerjaloka meskipunlloka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f) Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayahloka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- g) Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
- h) Terkait penginputan SIPT di Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalahlloka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i) Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempatlokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

Pada Triwulan II belum dilakukan perhitungan terhadap capaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 19. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Belum samanya pemahaman dinas kesehatan terkait tindak lanjut sampel KLB	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait keberadaan UPT dan keterlibatan serta peran serta UPT dalam penanganan dan penanggulangan KLB, khususnya terkait pengambilan dan pengujian sampel	Agustus	-	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait keberadaan UPT dan keterlibatan serta peran serta UPT dalam penanganan dan penanggulangan KLB, khususnya terkait pengambilan dan pengujian sampel	Agustus	-

4. Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

Sampel PIRT beresiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuanlainnya

Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuanlainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak lanjut atau ketentuanlainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepadallintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasusllintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 10%A + 60%B + 5%C + 5%D + 20%E

A= Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling

Cara Perhitungan :

(Capaian sampel PIRT UPT/Target PIRT UPT setahun sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

D = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak lanjut atau ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 20. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

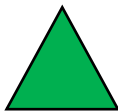
Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.33	109,8	

Nilai Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 93,33 % dengan capaian kinerja 109,8% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,8	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II memiliki capaian 109,8 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun depan dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengambilan sampel atau sampling dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sampel di wilayah pengawasan dengan kriteria sesuai dengan pedoman sampling dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.

Kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan pada TW II dimulai dari bulan April 2025 tidak dilakukan sampling, bulan Mei sejumlah 8 (delapan) sampel, bulan Juni tidak dilakukan sampling, sehingga jumlah total sampel yang disampling sampai TW II sebanyak 10 sampel telah memenuhi target tahun 2025 (100%). Kegiatan pengambilan sampling dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan pedoman sampling dan tetap berkoordinasi dengan UPT BPOM lain untuk keperluan pengujian. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengambilan sampling, hasil uji, dan kesesuaian penandaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari beberapa hal yang dilaksanakan terdapat beberapa hal yang belum maksimal yaitu sampel PIRT yang telah ditentukan oleh BPOM pusat terkait kategori pangannya pada pedoman sampling sulit dicari dilapangan contohnya sampel PIRT olahan unggas, dikarenakan sampel olahan unggas misal abon ayam, keripik usus, keripik kulit, keripik ceker, dll tidak tersedia di wilayah kerja. Sehingga digantikan kategori olahan kopi dan teh kering karena masih 1 kategori sampel PIRT. Dalam hal bergantinya kategori pangan, petugas juga sudah bersurat dengan BPOM pusat terkait perubahan kategori

pangan sampel PIRT yang semula kategori pangan Hasil Olahan Unggas menjadi kategori pangan kopi dan teh kering. Dari 10 sampel yang tersampling terdapat 6 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, yang artinya sampel tersebut perlu untuk di tindak lanjuti petugas, 4 sampel sudah ditindak lanjuti, sementara 2 sampel akan ditindaklanjuti pada TW selanjutnya.

Capaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 109,8%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Kesesuaian perencanaan sampling dengan rencana yang dibuat, dimana telah terealisasi seluruh sampel sampai TW II sebanyak total sampel, yaitu 10 sampel
2. Kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter uji yang dipilih, dimana semua sampel telah dilakukan pengujian dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian dengan waktu pelaporan hasil sesuai pedoman sampling
4. Kesesuaian monitoring penarikan dengan hasil uji dan surat edaran dari BPOM pusat yang ditindaklanjuti oleh UPT, dari 6 sampel yang perlu dilakukan tindak lanjut sudah 5 sampel yang dilakukan upaya tindak lanjut. Untuk satu sampel yang belum dilakukan tindak lanjut akan dilaksanakan pada Triwulan selanjutnya

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan capaian sampling dan pengujian sampel PIRT berisiko adalah:

1. Pelaksanaan sampling produk PIRT telah mencapai target sesuai dengan renlak pada TW 2, yaitu telah dilakukan sampling sebanyak 10 sampel dari 10 target sampel tahun 2025

2. Melaksanakan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait produk yang tidak memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM Tulang Bawang
3. Melaksanakan koordinasi dengan UPT BPOM terkait sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat diluar wilayah kerja Balai POM Tulang Bawang
4. Melakukan monitoring ketepatan waktu pelaporan pada SIPT dimana dari semua sampel yang telah di sampling pada Triwulan II telah diinput tepat waktu

e. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 22. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	434,10	433,10	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh nilai 433,10 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja sudah tercapai, tetapi masih bisa ditingkatkan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

bersama dinas kesehatan sebagai tindak lanjut sampel TMS. Dari laporan terlihat belum maksimalnya pencapaian anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian RPD

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling

j. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 23. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Target IKU telah tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling	Juni 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampling dan realisasi serta tindak lanjut hasil sampling	-	-	Perencanaan telah terlaksana sesuai
Masih adanya sampel TMS yang belum dilakukan Tindak lanjut	Membuat tindak lanjut, terhadap sarana yang hasil ujinya TMS (Turun bersama kesarana dengan dinas Kesehatan)	Juli 2025	-	-	-	-

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusilain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada mediallokal, KPID), hasil pengawasanllabel, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100 \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 24. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	30	35,14	117,13	

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan II adalah 35,14 % dengan capaian kinerja 117,13 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “sangat baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,68	35,14	39,18	Perlu Upaya Keras	

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 39,18% terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja triwulan berikutnya harus terus ditingkatkan sehingga target tahun 2025 memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Rekomendasi hasil pengawasan yang

diterbitkan/dikeluarkan sampai dengan TW II sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 13 (tiga belas) tindak lanjut/CAPA.

Capaian indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu sebesar 35,14%. Kurangnya capaian indikator tersebut dikarenakan pelaku usaha atau stakeholder belum melaporkan tindak lanjut/CAPA ke BPOM Di Tulang Bawang hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari pelaku usaha merespon CAPA sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan yaitu dengan menghubungi kembali pelaku usaha agar dapat menyampaikan tindak lanjut/CAPA, melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap tindak lanjut yang telah dikirimkan dengan penunjukan PIC pendamping dalam pembuatan respon CAPA oleh pelaku usaha, dan menjadwalkan desk CAPA untuk pelaku usaha yang belum memberikan tindak lanjut/CAPA.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Petugas telah rutin monitoring terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT. Rekomendasi yang telah dikeluarkan sebanyak 37 rekomendasi kepada pelaku usaha dan tindak lanjut/CAPA sebanyak 13 tindak lanjut/CAPA. Masih sedikitnya tindak lanjut/CAPA yang diberikan pelaku usaha dikarenakan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi dari UPT masih rendah dan belum memahami pentingnya perbaikan temuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM.
2. Masih belum optimal terutama pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan sehingga akan dibuat penjadwalan monitoring dan evaluasi rekomendasi secara lebih teratur.

3. Belum adanya uraian tugas yang khusus yang diberikan kepada petugas untuk melakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan.
4. Agar capaian indikator dapat maksimal maka petugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diterbitkan. Selanjutnya petugas meminta atau menghubungi kembali stakeholder untuk dapat segera memberikan tindak lanjut/CAPA serta memberikan bimbingan terhadap kesulitan pelaku usaha dalam membuat tindak lanjut/CAPA sehingga target rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholder dapat dicapai.

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 26 . Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	179,91	178,91	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh nilai 178,91 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder memenuhi target tetapi jika dibandingkan dengan target tahunan masih membutuhkan upaya keras untuk mencapainya sehingga masih perlunya peningkatan kinerja secara maksimal dengan penambahan beberapa kegiatan seperti penunjukan PIC dan pelaksanaan desk. Selain itu perlu penyesuaian RPD agar kegiatan bisa terlaksana secara efektif dan efisien

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 27. Matriks Tindak Lanjut Tahun 2025 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Belum seluruh Rekomendasi yang dikeluarkan ditindaklanjuti pelaku usaha	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti	Juni	-	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti	September	Belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Belum seluruh Rekomendasi yang	Penunjukan PIC untuk masing masing sarana	Juli				

dikeluarkan ditindaklanjuti pelaku usaha						
Belum seluruh Rekomendasi yang dikeluarkan ditindaklanjuti pelaku usaha	Pelaksanaan Desk Capa Untuk sarana yang belum merespon tindak lanjut	september				

6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- 3) fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:

regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	

Nilai Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di pada Triwulan II adalah 100 % dengan capaian kinerja 100 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Baik”. Dikarenakan dari 1 (satu) target sarana produksi Obat Bahan Alam yang ada di wilayah pengawasan BPOM di Tulang Bawang telah dilakukan pemeriksaan pada triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Tercapai	

Realisasi Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 100 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan terhadap sarana produksi sediaan farmasi yang ada di wilayah pengawasan UPT Balai POM Di Tulang Bawang. Sarana produksi sediaan farmasi terdiri dari sarana produksi obat, obat bahan alam dan suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sarana produksi sediaan farmasi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang berjumlah 1 (satu) sarana.

Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Juni 2025 yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi

obat bahan alam telah dilaksanakan pada TW II. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut bergantung pada kesesuaian pelaksanaan inspeksi dengan target dan perencanaan, kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat yang dilihat melalui SIPT, ketepatan/akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi, kesesuaian dan ketepatan waktu atas tidak lanjut hasil pengawasan sarana yang diterbitkan oleh UPT. Kegiatan pemeriksaan sarana produksi farmasi dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku sehingga penentuan pengambilan keputusan hasil inspeksi dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Serta dilakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan agar kegiatan pemeriksaan sarana produksi farmasi dapat terlaksana dan target dapat tercapai.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan juknis yang berlaku sehingga hasil pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya UPT BPOM juga melakukan koordinasi dengan sarana produksi sediaan farmasi agar proses yang telah dilakukan bisa dimonitoring.

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 30. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
<i>Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	-	-	-

Tingkat Efisiensi indikator kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat dihitung dikarenakan indikator ini belum memiliki nilai capaian kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target dan terhadap target tahunan capaiannya adalah 100% atau sudah terlaksana seluruhnya.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 31. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Belum dilakukan pemeriksaan	Akan dilakukan pemeriksaan pada TW III	Juli	Pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam telah dilakukan pada TW II	-	-	Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi OBat Bahan Alam

7. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- 1) Ketepatan waktu tindak lanjut
- 2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek:

- a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 15 pada bulan berikutnya;

- b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL
- c. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Koordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 32. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Target telah tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan	Juni	Telah dilakukan pemeriksaan dan	-	-	Target sudah dicapai

8. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- 1) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- 2) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer
- 4) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung :

= Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %

2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung :

= persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut)

C = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =
Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antarallain:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%

B : Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

C : Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel . Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	101,8	116,01	

Nilai Persentase sarana distribusi sarana farmasi yang memenuhi ketentuan di pada Triwulan II adalah 101,8 % dengan capaian kinerja 116,01 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat baik”. Dikarenakan dari 1 target sarana produksi Obat Bahan Alam yang ada di wilayah pengawasan BPOM di Tulang Bawang belum dilakukan pemeriksaan pada triwulan I. Kinerja ini harus ditingkatkan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	101,8	116,01	Tercapai	

Realisasi Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 100 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dilakukan terhadap sarana distribusi sediaan farmasi yang ada di wilayah pengawasan. Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan pada TW II dimulai dari bulan April 2025 sebanyak 6 (enam) sarana, bulan Mei 2025 sebanyak 19 (sembilan belas) sarana dan Juni 2025 sebanyak 19 (sembilan belas) sarana. Sarana distribusi sediaan farmasi terdiri dari sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi obat bahan alam, sarana distribusi suplemen kesehatan dan sarana distribusi Kosmetik.

Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 116,01%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan kesesuaian pemenuhan target pemeriksaan terhadap target yang diberikan telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. kesesuaian tindak lanjut dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan telah dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku dan kesesuaian dan ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan sarana.

Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku sehingga tindak lanjut/rekomendasi dan pengambilan keputusan dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan agar kegiatan pemeriksaan sarana

distribusi sediaan farmasi dapat terlaksana dan target dapat tercapai, serta melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi BPOM pusat yang diberikan melalui SIPT.

Hal yang belum optimal yaitu terkait dengan waktu pembuatan tindak lanjut yang cukup lama setelah kegiatan pemeriksaan dilakukan, hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dari petugas dalam melakukan pembuatan tindak lanjut, sehingga perlu dibuat monitoring dan evaluasi terhadap terhadap kegiatan pembuatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Agar indikator kinerja tersebut dapat dicapai dengan maksimal maka petugas harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kegiatan dan memberikan tindak lanjut/rekomendasi dan grading yang sesuai dengan hasil pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang telah dilakukan. Petugas harus melakukan monitoring terhadap waktu pada setiap tahapan pemeriksaan hingga penerbitan tindak lanjut/rekomendasi dan pelaporan di SIPT agar waktu pelaporan tidak terlewat.

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 32. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	676,99	675,99	75% Tidak Efisien

Tingkat efisiensi antara capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja yaitu sebesar 75% yang dikategorikan tidak efisien. Pada ketercapaian efektivitas dan efisiensi indikator kinerja ini tidak efisien dikarenakan capaian kinerja hingga bulan Juni tercapai hingga 116,01% sedangkan

realisasi anggaran yang terserap sebesar 17,14%. Hal ini menyebabkan tingginya indeks efisiensi dan tingkat efisiensi dikarenakan gap antara capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran yang tidak seiring.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target dan terhadap target tahunan capaiannya adalah 116,01%. Masih perlu dioptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memaksimalkan capaian pada TW selanjutnya.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 33. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Telah dilakukan pemeriksaan dan target telah tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan	Juni	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan	-	-	Target pemeriksaan telah tercapai

9. Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- 1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- 2) Ketepatan waktu pelaporan
- 3) Kesesuaian tindak lanjut

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = $20\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

B : Ketepatan tindak lanjut = $70\% \times ((\text{jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

C : Kesesuaian waktu pelaporan = $10\% \times ((\text{jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 34. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91,92	108,14	

Nilai Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 91,92 % dengan capaian kinerja 108,14 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Kinerja ini harus dioptimalkan serta dipertahankan di triwulan berikutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

*Tabel 35. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025
Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91,92	108,14	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 108,14 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan terhadap sarana distribusi yang ada di wilayah pengawasan. Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi yang dilakukan pada TW II dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2025 sebanyak 26 sarana. Dari sarana yang telah diperiksa terdapat 1 (satu) sarana distribusi pangan dengan kategori tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari 26 sarana distribusi telah dilakukan evaluasi oleh pusat terhadap ketepatan tindak lanjut sarana sejumlah 12 sarana. Dari 12 sarana yang telah dilakukan evaluasi oleh BPOM, terdapat 3 sarana yang tidak tepat dalam pengambilan keputusannya dikarenakan pada sarana yang dilakukan inspeksi ditemukan produk rusak dan kedaluwarsa.

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu sebesar 117,65%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Pemenuhan target pemeriksaan terhadap target yang diberikan
2. Kesesuaian tindak lanjut dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan
3. Kesesuaian dan ketepatan waktu pelaporan

Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku sehingga tindak lanjut/rekomendasi dan pengambilan keputusan dapat sesuai dengan peraturan yang ada. Serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan kegiatan agar kegiatan pemeriksaan sarana

distribusi pangan olahan dapat terlaksana dan target dapat tercapai, serta melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi BPOM pusat yang diberikan melalui SIPT.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilakukan agar indikator kinerja tercapai adalah petugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kegiatan dan memberikan tindak lanjut/rekomendasi yang sesuai dari hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang telah dilakukan. Petugas melakukan monitoring terhadap waktu pada setiap tahapan pemeriksaan hingga penerbitan tindak lanjut/rekomendasi dan pelaporan di SIPT agar waktu pelaporan tidak terlewat dari waktu yang telah ditetapkan, serta melakukan monitoring dan evaluasi hasil dari pengambilan kesimpulan dari BPOM RI berupa ketepatan tindak lanjut yang diberikan kepada sarana.

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 36. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	686,54	685,54	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh nilai 686,54 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal

ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan memenuhi target tetapi masih terdapat beberapa variabel penilaian yang masih bisa ditingkatkan seperti pelaksanaan evaluasi terhadap pengambilan keputusan pada hasil inspeksi agar sesuai dengan keputusan hasil evaluasi dengan pusat, sehingga diharapkan pada triwulan selanjutnya bisa didapatkan peningkatan kinerja dengan pelaksanaan beberapa rekomendasi kegiatan, seperti peningkatan serapan anggaran, pengambilan keputusan hasil inspeksi

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pada bulan berikutnya di tahun berjalan sesuai dengan perencanaan

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 37. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase fasilitas distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Pada bulan Januari belum dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pada bulan berikutnya di tahun berjalan sesuai dengan	Juni 2025	Telah dilakukan inspeksi sarana distribusi pangan olahan secara kontinyu dari bulan Februari-Juni	-	-	Sarana distribusi pangan olahan dilakukan inspeksi secara rutin

	<i>perencanaan</i>		2025			
<i>Perbedaan hasil evaluasi pengambilan keputusan dengan pusat</i>	<i>Melakukan monitoring evaluasi terhadap pengambilan keputusan tindak lanjut dari BPOM</i>	<i>September 2025</i>	-	-	-	-

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik merupakan target pengawasan iklan obat untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

Tepat waktu sesuai pedoman

**Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi
sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$**

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

b: Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

- a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $(\text{Jumlah media iklan yang sesuai} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 20\%$
- b. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan}) \times 40\%$
- c. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 38. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	

Nilai Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan II adalah 99,67 % dengan capaian kinerja 113 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “sangat baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target 2025 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	99,67	113	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 113 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”.

Kinerja triwulan berikutnya harus dapat dipertahankan sehingga target tahun 2025 memenuhi ekspektasi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pengawasan iklan dilakukan terhadap iklan dengan komoditi Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dengan kriteria sesuai dengan pengawasan iklan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun.

Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu sebesar 113%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan :

1. Pemenuhan target pengawasan iklan dengan target yang ditetapkan
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Akurasi pengambilan keputusan
4. Proporsi media iklan

Kegiatan pengawasan iklan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, disesuaikan dengan target yang ditetapkan. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian dan hasil evaluasi yang diberikan pusat agar pengawasan iklan, media, dan akurasi pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk dapat mencapai indikator pengawasan iklan dilakukan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan pengawasan iklan secara rutin setiap bulan. Hasil evaluasi BPOM pusat menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam mengambil kesimpulan untuk kegiatan pengawasan iklan yang akan dilakukan pada bulan selanjutnya sehingga target pengawasan iklan dapat dicapai.

e. Analisis efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Tabel 40. Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	47,12	46,12	75%

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh nilai 46,12 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim Triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan memenuhi target sehingga diharapkan diharapkan pada triwulan

selanjutnya target indicator kinerja ini dapat terus dipertahankan agar target tahunan dapat tercapai.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan realisasi (termasuk media iklan)

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 41 . Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Terdapat iklan yang realisasinya tidak sesuai dengan target media	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian perencanaan dan realisasi (termasuk media iklan)	Juni	Telah dilakukan monitoring terhadap realisasi	-	-	Monitoring iklan telah berjalan
	melakukan pencarian iklan sesuai media	September	-	-	-	

3.1.2. Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
2	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	9	9,5	105,7	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					105,7	

Sasaran kegiatan 2 yaitu Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang hanya terdiri dari 1 indikator kerja utama yaitu Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium

1. Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium

Standar Kemampuan laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan laboratorium tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1

- **Tingkat 4 laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Balai POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya

- **Tingkat 3 laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Laboratorium tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya
- **Tingkat 2 laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**
Laboratorium tingkat 2 merupakan Laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2
- **Tingkat 1 laboratorium Balai POM di Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen :

SKL tingkat 4 dan 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap :

- 1) Standar Ruang lingkup,
- 2) Standar Peralatan
- 3) Standar Kompetensi laboratorium,
- 4) Standar Metode yang terverifikasi.

SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu

- 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang lingkup,
- 2) Standar Peralatan
- 3) Standar Kompetensi laboratorium

**Cara perhitungan nilai Standar Kemampuanllaboratorium UPT
Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata
A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D)
→ (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)**

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuanllaboratorium Tingkat 4

$(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi})/2$
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi})/2$
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensillaboratorium BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium kimia} + \text{nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium biologi})/2$
- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar MA terverifikasi kimia} + \text{nilai pemenuhan standar MA biologi})/2$.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuanllaboratorium Tingkat 3 = $(50 \% \times a) + (20\% \times b) + (20\% \times c) + (10\% \times d)$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi})/2$
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi})/2$
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensillaboratorium BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium kimia} + \text{nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium biologi})/2$

- d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM =
(nilai pemenuhan standar MA terverifikasi kimia + nilai pemenuhan standar MA biologi)/2.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuanllaboratorium Tingkat 2

$$(75 \% \times a) + (15 \% \times b) + (10 \% \times c)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensillaboratorium BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium biologi)/2

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuanllaboratorium Tingkat 1

$$(75 \% \times a) + (15 \% \times b) + (10 \% \times c)$$

- a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2
- b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2
- c. Nilai pemenuhan standar kompetensillaboratorium BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi llaboratorium biologi)/2

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	9	9,5	105,7	

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium pada Triwulan II adalah 8,2 dengan capaian kinerja 102,5% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target 2025

Tabel 43. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	11	9,5	86,4	Akan Tercapai	

Realisasi Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 105,7 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemenuhan Standar Kompetensi laboratorium telah terpenuhi sesuai standar penilaian peralatan, standar ruang lingkup dan kompetensi personil terhadap penilaian tools SKL tahun 2025. Adapun uraian capaian terhadap masing masing tools adalah sebagai berikut:

1. Nilai standar penilaian peralatan pada TW II yaitu sebesar 10%, dibandingkan dengan nilai standar peralatan pada TW II yaitu 10% tidak mengalami perubahan dikarenakan pada tahun 2025 tidak terdapat pengadaan alat laboratorium baik kimia ataupun biologi.
2. Nilai standar ruang lingkup pengujian pada TW II yaitu sebesar 6,7% yang diambil dari rata rata SRL pengujian kimia dan pengujian mikrobiologi mengalami peningkatan dibandingkan nilai SLR pada capaian TW I yaitu sebesar 6,25%. Adapun capaian SRL yang baru dilaporkan adalah pengujian kimia pangan sebesar 50 % dan SRL Kimia Obat 3,48%. Capaian SRL Kimia pangan terdiri atas 4 parameter uji yaitu pengujian rapid tes kit boraks, formalin, rhodamin B dan metahnyil yellow dengan total sampel uji sampai dengan TW II yaitu 395 sampel pangan yang terdiri dari 230 sampel pada TW I dan 165 sampel pada TW II. Sementara capaian SRL Obat sebesar 3,48 didapat dari hasil pengujian atas 3 parameter uji Obat yang telah diselesaikan pada TW II yaitu Ibuprofen, Asam Mefenamat dan Haloperidol.
3. Nilai standar Pemenuhan Kompetensi laboratorium pada TW II yaitu sebesar 30%. Dibandingkan pada capaian TW I sebesar 20% hal ini

terjadi peningkatan capaian kompetensi karena sebanyak masing masing penguji pada Balai POM di Bandar Lampung telah dapat menyelesaikan 3 SRL pengujian Obat.

Nilai pemenuhan SKL tingkat 2 dan 1 = (75 % x Nilai pemenuhan SRL Balai POM) + (15% x Nilai pemenuhan standar peralatan Balai POM) + (10% x nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium tingkat 2 dan 1).

Selain itu laporan pembinaan PPPOMN sesuai surat tugas Nomor PR.02.02.10.04.25.51 terkait pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan SKL termasuk progress kelengkapan sarana prasarana laboratorium yang mendukung implementasi fungsi pengujian di laboratorium loka dan Balai POM Kabupaten/ Kota khususnya di Balai POM di Tulang Bawang sebagai pedoman dan tindak lanjut.

d. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Melaksanakan pengujian rapidtest obat dan pangan sesuai perencanaan
2. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi petugas dalam pelaksanaan pengujian
3. Pemenuhan alat dan reagensia laboratorium Merencanakan pengadaan reagen, alat gelas dan bahan penunjang laboratorium untuk digunakan dalam pengujian rapid obat.
4. Review atas dokumen rencana pengujian sampel obat dan makanan pada TW 2.

e. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 44. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja *Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium*

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium	231,91	230,92	75 %

Tingkat efisiensi antara capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja yaitu sebesar 75% yang dikategorikan tidak efisien. Hal ini dikarenakan Capaian realisasi anggaran bulan Juni lebih rendah dibandingkan capaian kinerja bulan Juni. Tingkat efisiensi dapat diperhitungkan dapat tercapai pada akhir tahun 2025.

f. Informasi Tentang Pemanfaatanllaporan Kinerja Berdasarkanllaporan Kierja Tahun 2025

1. Laporan ini digunakan sebagai acuan dalam merencanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disusun untuk mencapai target pemenuhan SKL pada tahun berjalan dan sebagai dasar pemenuhan capaian atau kinerja dan realisasi anggaran.
2. Laporan ini digunakan sebagai dasar dan pedoman perhitungan nilai SKL UPT pada target capaian di tahun selanjutnya.
3. Laporan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam rangka pemenuhan stnadarllaboratorium yang memadai di Balai POM di Tulang Bawang.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Menyusun rencana pengujian SKL tahun 2025 dan pengadaan bahan penunjang pengujian (Alat gelas, reagen) dan kebutuhan rapid tes kit pangan.

h.Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 45. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Tulang Bawang sesuai standar kemampuan laboratorium*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timel ine	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomend asi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeli ne	
Timeline pengujian obat dan makanan secara rapid test kit belum ditetapkan dan bahan penunjang pengujian obat dan makanan belum memadai	Menyusun rencana pengujian SKL tahun 2025 dan pengadaan bahan penunjang pengujian (Alat gelas, reagen) dan kebutuhan rapid tes kit pangan.	Juni	Dokumen perencanaan pengujian tahun 2025 dan pengadaan rapid test kit pangan	-	-	
Adanya penurunan sampling Obat berpengaruh terhadap jumlah sampel Obat yang dapat diuji di Balai POM Tulang Bawang terhadap perencanaan pengujian yang telah ditentukan	Melakukan tindak lanjut perencanaan pengujian dengan koordinasi bersama tim sampling untuk menentukan target sampel Obat yang akan diuji	Septem ber		Melakukan tindak lanjut perencanaan pengujian dengan koordinasi bersama tim sampling untuk menentukan target sampel Obat yang akan diuji	Septem ber	Sampel sudah tersampling sebelum target ditetapkan

Reagen belum tersedia untuk pengujian dengan penambahan parameter uji Obat untuk menambah nilai SKL	Melakukan pengadaan reagen sesuai parameter uji Obat yang akan dilakukan	September		Sedang berproses pengadaan reagen dan alat gelas.	September	Sudah dilakukan pemesanan dan telah di RPD kan pada bulan Agustus
Hasil pendampingan PPPOMN pembuat layout perencanaan laboratorium untuk pengujian kimia dan mikrobiologi sehingga ruangan dapat siap untuk direnovasi ketika anggaran disetujui.	Melakukan penyusunan layout perencanaan laboratorium untuk pengujian kimia dan mikrobiologi	September		Sedang berproses terkait penyusunan perencanaan laboratorium untuk pengujian kimia dan mikrobiologi	September	Belum dilakukan koordinasi dengan pihak lain terkait layout perencanaan laboratorium untuk pengujian kimia dan mikrobiologi

3.1.3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	95,59	110,95	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	45	75	166,67	
		Jumlah desa pangan aman	75	75	100	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100	
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3				119,16

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu :

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- b. Sumber atau Narasumber KIE
- c. Konten atau Informasi KIE
- d. Pemahaman Audiens KIE
- e. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

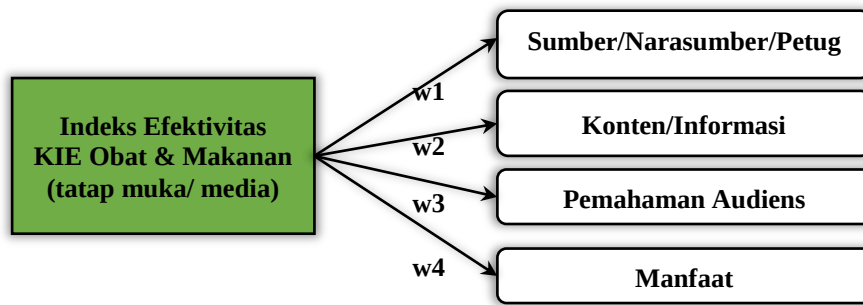
Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*

Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	$(25\% \times X_1) + (25\% \times X_2) + (25\% \times X_3) + (25\% \times X_4)$
--	---

Adapun kategori nilai tingkat efektifitas KIE sebagai berikut :

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65,01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 46. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	95,59	110,95	●

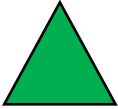
Nilai Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan II adalah 86,83 dengan capaian kinerja 110,95 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Responden yang disurvei oleh petugas pada triwulan II sebanyak 28 orang.

Berdasarkan kategori nilai efektifitas dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan oleh Balai POM di Tulang Bawang masuk dalam kategori “Sangat Efektif”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	86,16	95,59	110,95	Tercapai / Melampaui	

Realisasi Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 110,95 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai/Melampaui”. Kinerja ini harus dipertahankan serta ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Tulang Bawang melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektifitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan target sebesar 86,16 % di tahun 2025.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Indikator diukur melalui survei terhadap 4 kriteria dengan hasil capaian pada masing-masing indikator di Triwulan II yaitu :

1. Narasumber / Petugas (94.381)
2. Tingkat pemahaman (88,131)
3. Konten Informasi (95.118)
4. Manfaat (89.899)

Melalui survey yang dilaksanakan diperoleh nilai indeks tatap muka 91,88 dengan total responden 99 dan indeks media 97,59 dengan total responden 55 sehingga diperoleh total indeks efektifitas KIE 99,30 (Efektif). Jumlah responden belum memenuhi target karena target responden pada dashboard merupakan target tahunan yang akan dicapai dari jumlah target orang pada unit pelaksana. Persepsi petugas terhadap target responden tatap muka dan media perlu sudah dikoordinasikan dengan unit pengampu karena adanya tools baru dan pembaruan subsite yang digunakan untuk perhitungan indeks evaluasi dengan hasil bahwa KIE rutin dan KIE media masing-masing responden targetnya adalah 107

untuk 1 tahun, hal tersebut berdasarkan populasi target KIE 147 orang, dengan hasil exercise pertriwulan rata-rata adalah 27 orang. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut target responden pertriwulan untuk masing-masing media telah terpenuhi dan sesuai perencanaan *breakdown* responden yang telah disusun.

Capaian indeks 94,74 dapat dipenuhi pada triwulan II berkolaborasi dengan lintas sektor melalui kegiatan forum konsultasi publik pada tanggal 30 April 2025 yang melibatkan pemerintah daerah serta seluruh kalangan penerima layanan Balai POM di Tulang Bawang. Selain itu, kegiatan lain yang langsung kepada masyarakat melalui edukasi Stunting dan Pencegahan Keracunan yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Senang Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 13 Juni 2025 kepada target sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita, serta remaja putri di wilayah tersebut. Peningkatan target kedepannya untuk mencapai jumlah responden yang ditargetkan akan berkolaborasi dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama lintas sektor terkait.

KIE Stunting dengan pelibatan peserta ibu dengan balita, kesulitan dalam mengikuti rangkaian kegiatan KIE lengkap karena terdistraksi oleh balita. Diperlukan metode/penyesuaian waktu edukasi yang tepat sehingga optimal dalam penyampaian materi edukasi kepada target sasaran.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Capaian indeks 95,59 dapat dipenuhi pada triwulan 2 berkolaborasi dengan lintas sektor melalui kegiatan forum konsultasi publik yang melibatkan pemerintah daerah serta seluruh kalangan penerima layanan Balai POM di Tulang Bawang. Selain itu, kegiatan lain yang langsung kepada masyarakat melalui edukasi Stunting dan Pencegahan Keracunan kepada target sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan balita, serta remaja putri. Pelaksanaan KIE melalui media juga dilaksanakan pada media

elektronik dan cetak, KIE media elektronik dilaksanakan melalui media radio BAS Tulang Bawang dengan materi Pencegahan AMR (Antimikroba Resistance): Bahaya Penggunaan Obat Antibiotik Sembarangan. Serta KIE melalui media cetak dengan penyampaian produk informasi keamanan pangan, bahan berbahaya pangan, dan Cek KLIK kepada kelompok pasar melalui Edukasi Blusukan Pasar (EBP) di wilayah kerja. Koordinasi bersamallintas sektor sudah dilaksanakan untuk menyusun rencana kolaborasi kegiatan pada triwulan III.

2. Metode penyampaian pada sasaran KIE dengan materi berupa game edukasi dilaksanakan dengan target sasaran anak remaja pada kegiatan peta paman baya di SMA N 2 Tulang Bawang Barat melalui Game Riko (Remaja Anti Rokok).
3. Pelatihan pelayanan publik mandiri bahasa isyarat dengan mengundang narasumber dari SLB Tulang Bawang Barat dilaksanakan dalam rangka menunjang pelayanan edukasi bagi petugas untuk target sasaran kelompok rentan/disabilitas. Selanjutnya telah disusun akan dilakukan edukasi kepada kelompok rentan melalui inovasi rumah rentan pada triwulan III.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 48. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	400,18	399,18	75 %

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang diperoleh nilai 395,62 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan internal dalam menilai sejauh mana kegiatan KIE telah mencapai target sasaran, menjadi dasar pengambilan keputusan strategis untuk perbaikan program, menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan terkait (Dinas terkait dan masyarakat), menyusun rekomendasi kebijakan dan perencanaan kegiatan di triwulan berikutnya, laporan capaian kinerja ini dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan revisi anggaran pada kesempatan berikutnya sehingga dengan melaksanakan revisi anggaran, maka penyerapan anggaran bisa lebih disesuaikan dengan progres capaian kinerja.
2. Laporan ini juga dapat dimanfaatkan untuk penggunaan eksternal bagi pemangku kepentingan. Bagi dinas terkait sebagai bahan monitoring dan evaluasi lintas program serta acuan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam bidang kefarmasian dan pangan. Bagi unit pelaksana teknis BPOM atau pusa dapat menjadi sumber data untuk evaluasi kebijakan nasional serta penyusunan pedoman teknis pelaksanaan KIE yang lebih efektif, serta bagi mitra dan lembaga Pendidikan dapat digunakan sebagai bahan ajar, studi kasus, atau dasar kerja sama kegiatan edukatif yang melibatkan mahasiswa dan komunitas.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan kolaborasi kegiatan dengan kegiatan stakeholder untuk menambah jumlah responden
- Breakdown target responden, dan perencanaan kolaborasi kegiatan.
- Melakukan koordinasi dengan unit pengampu terkait.
- Diseminasi antar pegawai

h.Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 49. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Jumlah responden masih rendah	1. Melakukan kolaborasi kegiatan dengan kegiatan stakeholder untuk menambah jumlah responden	Juni 2025	Melakukan koordinasi dengan stakeholder pada seluruh wilayah kerja.	Closed	Closed	Jumlah responden terpenuhi
	2. Breakdown target responden, dan perencanaan kolaborasi kegiatan.	Mei 2025				
	3. Melakukan koordinasi	Mei 2025				

	dengan unit pengampu terkait.	Juni 2025				
	4. Diseminasi antar pegawai					
KIE Stunting dengan pelibatan peserta ibu dengan balita, kesulitan dalam mengikuti rangkaian kegiatan KIE karena terdistraksi oleh balita.	1. Melakukan penyesuaian waktu dan teknis KIE stunting yang ditambahkan kegiatan permainan yang juga melibatkan anak-anak. 2. Melakukan kolaborasi kegiatan dengan kegiatan stakeholder untuk pelaksanaan KIE kepada kelompok rentan.	September 2025 5 September 2025	3. Melakukan kolaborasi kegiatan dengan kegiatan stakeholder untuk menambah jumlah responden 4. Breakdown target responden, dan perencanaan kolaborasi kegiatan. 5. Melakukan koordinasi dengan unit pengampu terkait. 6. Diseminasi antar pegawai	closed	closed	Pelaksanaan KIE Optimal

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

B. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Kurikulum Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kotallain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasilintas sektor keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi

keamanan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

No	Kegiatan	Progress	BB/Balai POM (2025 -2026)	Progress	untuk UPT yang baru mengikuti di 2025 (*)
1	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	20%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)	20%	Maret – Mei (TW 1 – TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	20%	April – Juli (TW1-TW3)	20%	April – Juli (TW1-TW3)
4	Monitoring dan Evaluasi Program	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)	15%	Juli – November (TW 3- TW 4)
5	Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)	20%	Agustus – Desember (TW 3 -TW 4)
6	Pengawasan	5%	April – Desember (TW 2 - TW 4)	0	
Total Skor		100%		100%	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 50. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW I I	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	45	75	166,67	

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan II adalah dengan capaian kinerja 75 %

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	75	75	Akan Tercapai	

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 75 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Melampaui”. Kinerja ini harus ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian target 75% dari target 100% jumlah sekolah 2 (dua sekolah) yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan tahapan advokasillintas sektor program prioritas nasional dengan dukungan darillintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Ilokus Desa, Pasar, dan Sekolah Intervensi. Pelaksanaan advokasi berkoordinasi dengan Balai koordinator untuk peningkatan kompetensi Balai POM di Tulang Bawang dalam pelaksanaan kegiatan advokasi pada triwulan 1. Selanjutnya pada triwulan II pelaksanaan kegiatan sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tanggal 09 Mei 2025 dan bimbingan teknis

keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah tahun 2025 pada 21 Mei 2025. Pelaksanaan Sosialisasi kepada target sekolah full intervensi dan perluasan & Penilaian pengetahuan pre dan post kegiatan (difokuskan untuk yang full intervensi) telah selesai dilaksanakan. Serta telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan kepada kader target sekolah full intervensi.

Jumlah kader yang terbentuk 4 orang berasal dari 2 orang SD Negeri 18 TBT dan SD N 26 TBT Kabupaten Tulang Bawang Barat. Masing-masing sudah melaksanakan intervensi kader ke komunitas sekolah berupa sosialisasi tentang keamanan pangan.

Pencapaian target 75% pada Triwulan II melampaui target Triwulan 45%, hal ini disebabkan target pembobotan masih mengacu pada target pembobotan tahapan kegiatan sebelum efisiensi anggaran dan adanya surat edaran penyesuaian tahapan dan pembobotan kegiatan karena efisiensi anggaran sesuai surat Direktur PMPUPO nomor B-PM.02.01.55.03.25.14 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan anggaran untuk capaian tahapan jumlah sekolah (QDB.01) dan advokasi (QDB.02). Adanya efisiensi anggaran, tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan *hybrid* (kombinasiluring dan daring) untuk tahapan sosialisasi yang dilaksanakan pada triwulan II.

g. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 52. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2728,05	2727,05	Tidak Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diperoleh nilai 2728,05 sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan internal dalam monitoring capaian program untuk mengetahui jumlah sekolah yang telah terlibat serta tren peningkatan atau penurunan partisipasi sekolah dari tahun ke tahun, untuk mengidentifikasi daerah atau sekolah yang belum terjangkau program pembudayaan keamanan pangan, serta menilai pendekatan komunikasi dan metode pembelajaran yang paling efektif digunakan di lingkungan sekolah. Serta untuk penyusunan strategi lanjutan dalam mengembangkan intervensi yang lebih spesifik dan tepat sasaran berdasarkan data kinerja.
2. Laporan ini juga dapat dimanfaatkan untuk penggunaan eksternal bagi pemangku kepentingan. Bagi dinas terkait sebagai bahan

pertimbangan dalam integrasi isu keamanan pangan ke dalam kurikulum dan kegiatan pembinaan sekolah, bagi pihak sekolah (guru dan kepala sekolah) menjadi tolok ukur untuk mengembangkan program pembiasaan hidup sehat dan bersih berbasis keamanan pangan, serta Orang tua dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga pangan aman sejak usia dini. Serta sebagai data dasar untuk memperluas kerja sama dan kampanye publik yang berkelanjutan.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaksanakan tahapan kegiatan sosialisasi bimtek pada tw
- Berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan

h.Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 53. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
pelaksanaan kegiatan pada tahapan advokasi	1. nakan tahapan kegiatan sosialisasi bimtek pada tw II. 2. berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas	Juni 2025	-	-	-	Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target tahapan kegiatan

	pelaksanaan tahapan kegiatan.					
1. Pelaksanaan kegiatan pada tahapan kegiatan sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah.	1. melaksanakan pelaksanaan SK Tim Keamanan Pangan Sekolah 2. Melaksanakan Monev dan Sertifikasi Sekolah pada TW III.	September 2025	Pelaksanaan kegiatan pada tahapan kegiatan sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Dan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah pada TW II	Closed	Closed	Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target tahapan kegiatan
2. Tahapan pelaksanaan dan program sekolah yang akan dilaksanakan terhenti sementara dikarenakan bertepatan libur sekolah	1. Melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai program sekolah yang direncanakan dan sertifikasi sekolah pada TW III	September 2025	-	-	-	Tahapan pelaksanaan dan program sekolah telah dilaksanakan

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadilokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- 1) kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
.			
1.	Advokasi	27%	Januari – April
2.	Pelatihan kader	17%	April – Juni
3.	Bimtek komunitas	22%	Mei – September
4.	Fasilitasi	12%	Juni – Oktober
5.	Monev	17%	Oktober – November
6.	Pengadaan PIKP	5%	TW 1 – TW 2
	Total Skor	100%	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	75	75	100	

Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman pada Triwulan II adalah 25%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025
Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Jumlah Desa Pangan Aman	100	75	75	Akan Tercapai	

Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 75 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Akan tercapai”. Kinerja ini harus ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian target 75% dari target 100% jumlah desa (1 desa) yang melaksanakan desa pangan aman merupakan tahapan advokasillintas sektor program prioritas nasional dengan dukungan darillintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Ilokus Desa, Pasar, dan Desa Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret di Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta pada TW II dilaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) pada tanggal 29 April 2025 secara daring, dengan jumlah KKPD terbentuk sejumlah 6 orang, jumlah kader ini melebihi target minimal yaitu 5 orang, materi yang diberikan saat pelatihan KKPD oleh PIC Balai POM di Tulang Bawang yaitu Keamanan Pangan, Stunting dan Keamanan Pangan, Pencegahan Keracunan Pangan, serta materi tambahan Cek KLIK, dan Aplikasi BPOM, tahapan pelaksanaan kegiatan dilanjutkan dengan Bimtek Komunitas Desa yang dilaksanakan pada 04 Juni 2025 dengan peserta sejumlah 32 orang komunitas desa yang terdiri dari komunitas pelaku usaha, ibu rumah tangga, remaja, sekolah, ritel, karang taruna, kader posyandu dan TP-PKK. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Petugas BPOM di Tulang Bawang serta Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD). Selanjutnya adanya kendala pada pelaksanaan kegiatan ini yang dilaksanakan pada pagi hari kepada komunitas desa namun tidak dapat berjalan tepat waktu, dikarenakan aktivitas masyarakat desa sehingga tidak dapat hadir sesuai waktu undangan. Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan yang akan melibatkan komunitas masyarakat desa pada kegiatan berikutnya perlu melakukan penyesuaian waktu kegiatan.

Dengan adanya efisiensi anggaran, unit pengampu melaksanakan pertemuan koordinasi untuk penyesuaian target tahapan pelaksanaan

kegiatan menjadi 4 tahapan kegiatan pada TW 1 serta pada TW II menyampaikan surat Surat Edaran Nomor PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2025 hal tersebut terkait pelibatan sekolah yang melaksanakan program MBG. Sehingga dalam pelaksanaan Bimtek Komunitas pada komunitas Sekolah yang diundang diberikan pembekalan program Makan Bergizi Gratis terkait pemahaman cara produksi pangan yang baik dan praktik baik dalam mengonsumsi pangan yang aman.

Pelaksanaan kegiatan secara mandiri dilaksanakan pula oleh Kader Keamanan Pangan Desa, melalui pendampingan PIC Balai POM di Tulang Bawang. Berupa kegiatan sosialisasi kepada komunitas ibu hamil, menyusui, dan ibu dengan balita pada kegiatan posyandu bulanan desa serta kegiatan arisan dan pengajian masyarakat terkait pemaparan materi stunting dan keamanan pangan serta keamanan pangan keluarga. Serta Kegiatan Fasilitasi mandiri dilakukan di salah satu rumah komunitas terkait praktek keamanan pangan.

Tercapai target tahapan pembobotan kegiatan tidak lepas dari komitmen dari KKPD serta dukungan dari Kepala Tiyuh Desa Margo Mulyo yang menjadilokus desa intervensi. Hal ini tertuang pula dalam surat pernyataan komitmen KKPD serta dukungan dari Kepala Tiyuh yang hadir pada Bimtek Komunitas Desa serta dukungan dari lintas sektor pemerintah daerah terkait melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan anggaran untuk capaian tahapan jumlah desa (QDB.02) dan (QDB.01). Adanya efisiensi anggaran, tahapan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan *hybrid* (kombinasi luring dan daring) untuk tahapan pembentukan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang dilaksanakan pada triwulan II.

Pencapaian target 75% dari target 100% jumlah desa (1 desa) yang melaksanakan desa pangan aman merupakan tahapan Advokasi (25%), Pembentukan KKPD(25%), dan Bimtek Komunitas Desa (25%), dan Fasilitasi Keamanan Pangan (0%). Tercapai target tahapan pembobotan kegiatan tidak lepas dari komitmen dari KKPD serta dukungan dari Kepala Tiyuh Desa Margo Mulyo yang menjadilokus desa intervensi. Hal ini tertuang pula dalam surat pernyataan komitmen KKPD serta dukungan dari Kepala Tiyuh yang hadir pada Bimtek Komunitas Desa serta dukungan dari lintas sektor pemerintah daerah terkait melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adanya kendala pada pelaksanaan kegiatan yang melibatkan komunitas desa dilaksanakan pada pagi hari tidak dapat berjalan tepat waktu, dikarenakan aktivitas masyarakat desa sehingga tidak dapat hadir sesuai waktu undangan. Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan yang akan melibatkan komunitas masyarakat desa pada kegiatan berikutnya perlu melakukan penyesuaian waktu kegiatan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 56. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Jumlah Desa Pangan Aman	1011,9	1010,9	Tidak Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman diperoleh nilai 1101,9 sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Jumlah Desa Pangan Aman masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan internal dalam monitoring program untuk mengetahui capaian jumlah desa yang sudah menjalankan program pangan aman sesuai indikator kinerja yang ditetapkan, pemetaan wilayah intervensi untuk mengidentifikasi desa yang terpapar atau belum terjangkau program, menjadi dasar dalam penyusunan strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lokal, penguatan argumentasi anggaran dan kebijakan serta memberikan bukti kinerja sebagai dasar pengusulan sumber daya tambahan.
2. Laporan ini juga dapat dimanfaatkan untuk penggunaan eksternal bagi pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Desa sebagai tolok ukur capaian pembangunan desa dalam aspek kesehatan dan ketahanan pangan, bagi dinas terkait sebagai referensi dalam menyusun program kolaboratif yang terintegrasi dengan program lain seperti desa sehat, sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan gizi masyarakat. Serta bagi BPOM Pusat Untuk menilai implementasi program nasional keamanan pangan.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
- berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 57. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Jumlah Desa Pangan Aman*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
pelaksanaan kegiatan pada tahapan advokasi	1. melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 2. berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan.	Juni 2025		-	-	Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target tahapan kegiatan.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar

aman, money pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April
2	Survei Pasar	5%	Januari-Mei
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei
4	Penyuluhan	10%	April-Mei
5	Kampanye	10%	April-Mei
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus
7	Pengawalan	10%	Februari-Oktober
Total Skor		100%	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 58. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100	

Capaian indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan II adalah 75%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	75	75	Akan tercapai	

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 75 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Akan Tercapai”. Kinerja ini harus dipertahankan serta ditingkatkan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian target 75% dari target 100% jumlah pasar (1 pasar) yang melaksanakan pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan tahapan advokasillintas sektor (25%) program prioritas nasional dengan dukungan darillintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Ilokus Desa, Pasar, dan Sekolah Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan advokasi berkoordinasi dengan balai koordinator untuk peningkatan kompetensi Balai POM di Tulang Bawang dalam pelaksanaan kegiatan advokasi pada triwulan 1. Pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai pedoman (25%) kegiatan melibatkan Diskoperindag kabupaten Tulang Bawang Barat, pengelola pasar, pedagang dan paguyuban pasar serta telah dibentuk Kader Keamanan Pangan Pasar Aman. Kegiatan capaian TW II juga telah dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai pedoman (25%) yang dilakukan oleh kader keamanan pangan pasar berkolaborasi dengan Balai POM di Tulang Bawang.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian target 75% dari target 100% jumlah pasar (1 pasar) yang melaksanakan pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan tahapan advokasillintas sektor (25%) program prioritas nasional dengan dukungan darillintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam

kegiatan Dinas Kesehatan, Bapperida, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Ilokus Desa, Pasar, dan Sekolah Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan advokasi berkoordinasi dengan balai koordinator untuk peningkatan kompetensi Balai POM di Tulang Bawang dalam pelaksanaan kegiatan advokasi pada triwulan 1. Pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai pedoman (25%) kegiatan melibatkan Diskoperindag kabupaten Tulang Bawang Barat, pengelola pasar, pedagang dan paguyuban pasar serta telah dibentuk Kader Keamanan Pangan Pasar Aman. Kegiatan capaian TW II juga telah dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai pedoman (25%) yang dilakukan oleh kader keamanan pangan pasar berkolaborasi dengan Balai POM di Tulang Bawang.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 60. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	917,53	916,53	75% Tidak Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman diperoleh nilai 916,53 sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Jumlah Desa Pangan Aman masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan ini dapat dimanfaatkan untuk penggunaan internal dalam Monitoring implementasi program untuk mengetahui jumlah pasar yang telah dibina dan mencapai status pembobotan tahapan kegiatan, evaluasi efektivitas pelatihan dan pendampingan untuk menilai sejauh mana intervensi yang dilakukan memberikan dampak terhadap perilaku pedagang dan pengelola pasar, pemetaan capaian wilayah untuk Mengidentifikasi lokasi yang berhasil dan yang masih membutuhkan intervensi lanjutan, serta sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan cakupan untuk merancang pendekatan baru atau menyesuaikan metode yang lebih sesuai dengan karakteristik pasar.
2. Laporan ini juga dapat dimanfaatkan untuk penggunaan eksternal bagi pemangku kepentingan. Bagi Dinas terkait sebagai referensi dalam perencanaan program pembinaan pasar dan pelaksanaan pengawasan terpadu. Bagi Pengelola Pasar dan Pemerintah Daerah untuk Pencapaian target 75% dari target 100% jumlah pasar (1 pasar) yang melaksanakan pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan tahapan advokasi lintas sektor (25%) program prioritas nasional dengan dukungan dari lintas sektor pemerintah daerah yang terlibat dalam kegiatan Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kecamatan, Loka Desa, Pasar, dan Sekolah Intervensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan advokasi berkoordinasi dengan balai koordinator untuk peningkatan kompetensi Balai POM di Tulang Bawang dalam pelaksanaan kegiatan advokasi pada triwulan 1. Pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai pedoman (25%) kegiatan melibatkan Diskoperindag kabupaten Tulang Bawang Barat, pengelola pasar, pedagang dan paguyuban pasar serta telah dibentuk Kader

Keamanan Pangan Pasar Aman. Kegiatan capaian TW II juga telah dilakukan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar dalam rangka Program Pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai pedoman (25%) yang dilakukan oleh kader keamanan pangan pasar berkolaborasi dengan Balai POM di Tulang Bawang.

3. k memperkuat regulasi dan kebijakan lokal dalam menjaga kualitas dan keamanan produk pangan yang dijual di pasar. Bagi Komunitas Pedagang dan Konsumen dan memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas pangan demi kesehatan masyarakat. Serta bagi instansi pusat: Menyusun arah kebijakan nasional terkait penguatan pasar tradisional sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan.

g.Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- melaksanakan tahapan kegiatan sosialisasi dan blmtek keamanan pangan
- berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk *peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan*

h.Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 61. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	

Pelaksanaan kegiatan pada tahapan advokasi	1. melaksanakan tahapan kegiatan sosialisasi dan blmtek keamanan pangan. 2. berkoordinasi dengan Balai Koordinator untuk peningkatan kompetensi petugas pelaksanaan tahapan kegiatan.	Juni 2025	-	-	-	Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target tahapan kegiatan
1. Pelaksanaan pada tahapan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	1. Monitoring dan Evalausi dilaksanakan pada TW III secara alluring	September 2025	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar dilaksanakan pada TW II secara luring	-	-	1. Capaian pelaksanaan kegiatan sesuai target tahapan kegiatan
2. Pelaksanaan sosialisasi kepada komunitas pasar yang dilaksanakan pada hari pasar terkendala pada waktu kader kurang maksimal karena kader juga merupakan pengelola pasar sehingga	2. Melakukan penyesuaian waktu kegiatan	September 2025				2. Waktu kegiatan telah sesuai dan pelaksanaan kegiatan maksimal

berbenturan aktivitas rutin di pasar						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

3.1.4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian TW I	Kriteria
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35	95	271,43	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 4					271,43	

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan
- b) Usaha Kecil memiliki modal usahalebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

UMKM yang memenuhi standar adalah:

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK

Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan = $(A + B + C)/3$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 62. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35	95	271,43	

Nilai Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan II adalah 60 % dengan capaian kinerja 400 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	95	104,39	Melampaui	

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 271,43 % terhadap target tahun 2025 dengan kriteria capaian “Melampaui”. Kinerja di triwulan selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat memenuhi ekspektasi

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan pendampingan UMKM dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan komitmen pelaku usaha UMKM di wilayah kerja dan dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan pendampingan UMKM dilakukan pada TW II yaitu dilakukan sosialisasi/KIE keamanan pangan dan Bimbingan Teknis CPPOB.

Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan atau IP CPPOB pangan olahan yaitu sebesar 271,43%. Keberhasilan dari capaian indikator tersebut dikarenakan telah dilaksanakannya tahapan:

1. Penetapan Target UMKM
2. Fasilitasi pendampingan

Kegiatan pendampingan UMKM akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Serta dilakukan evaluasi terhadap capaian yang ada.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk dapat mencapai indikator pendampingan UMKM dilakukan kegiatan monitoring dalam pelaksanaan setiap tahapan pendampingan secara rutin setiap bulan. Melakukan inovasi dalam pelaksanaan pendampingan UMKM dan berkolaborasi dengan stakeholder atau dinas terkait dalam pembinaan UMKM

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 64. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan	977,99	976,99	75%

Dari tabel di atas dapat dilihat Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang

baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan diperoleh nilai 976,99 sedangkan persentase capaian TE adalah 75 % sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja

f. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja sudah tercapai, namun tetap ditingkatkan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bersama BPOM pusat, dan juga pelaporan akhir pada akhir tahun atau TW IV. Dari laporan terlihat belum maksimalnya pencapaian anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian RPD

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan monitoring terhadap tahapan pendampingan

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 65. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP CPPOB pangan olahan*

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Terdapat perubahan tahapan pendampingan	Melakukan monitoring terhadap tahapan pendampingan	Juni 2025	Telah dilakukan rangkaian tahapan pendampingan hingga umk mendapat NIE	-	-	UMK sudah selesai dilakukan pendampingan sesuai tahapan pendampingan

Tahapan belum selesai, masih terdapat laporan akhir dan monev pendampingan	Melakukan monitoring terhadap tahapan pelaporan akhir pendampingan	November 2025	-	-	-	-
--	--	---------------	---	---	---	---

3.1.5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	50	50	100	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5					100	

Sasaran kegiatan 5 yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 66. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	50	50	100	

Nilai Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada triwulan II adalah 50 % dari target 50% yang telah ditetapkan. Kinerja di triwulan selanjutnya harus terus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan	90	50	55,5	Perlu Upaya Keras	

sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang					
---	--	--	--	--	--

Realisasi Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 55,5 % terhadap target tahun 2025 dengan kriteria capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja triwulan berikutnya harus ditingkatkan agar target kinerja tahun 2025 tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunankinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dapat dicapai karena pengumpulan laporan yang dilaksanakan secara tepat waktu. Laporan Patroli Siber dan Profiling selama Triwulan II selalu dikirimkan tidak melewati waktu pelaporan sehingga capaian kinerja di Triwulan II sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

No	Bulan	Laporan Siber	Keterangan	Laporan Profiling
1	April	15 laporan	Takedown	1 laporan
2	Mei	10 laporan	Takedown	1 laporan
3	Juni	9 laporan	Takedown	1 laporan

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan meningkatkan hasil dari patroli siber yang bisa ditindaklanjuti ke profiling sehinggallaporan profiling selalu ada pada setiap bulannya. Kemudian database dari hasil patroli siber juga bisallebih ditata sehingga ada runtutan dan benang merahnya mulai dari patroli siber, hingga profiling yang berpotensi naik ke penyidikan.

Tidak menutup kemungkinan bahwallaporan Profiling bisa kembali dilaporkan Nihil jika tidak ada hasil dari patroli siber yangllayak untuk diprofiling. Namun demikian, perlu dilakukan monitoring terhadap hasil patroli siber yang telah dilaporkan sebelumnya jika produk yang sama kembali diunggah oleh pemilik akun sehingga hal ini bisa dijadikan subjek untukllaporan profiling bulanan hasil dari patroli siber.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 68 . Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	37,26	37,26	75% (Tidak Efisien)

Tingkat Efisiensi indikator kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan indicator ini belum memiliki nilai capaian kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Laporan ini dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan penyesuaian dan revisi anggaran pada triwulan berikutnya agar capaian kinerja dapat selaras dengan penyerapan anggaran
2. Laporan ini juga bisa dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan-kegiatan pada periode berikutnya yang dapat meningkatkan capaian kinerja. Kegiatan yang dimaksud tertuang pada poin “Analisa Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja” dan juga tabel “Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya” yang ada pada laporan ini.
3. Laporan ini juga dimanfaatkan untuk penganjangan inovasi Bertaring (Pemberian Peringatan kepada Pelanggar Daring) yang dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan kepada akun-akun yang terjaring dalam operasi patroli siber rutin.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melaksanakan koordinasi ke CJS, lalu membuat kajian penghentian perkara, dan melakukan SP3 berdasarkan kajian tersebut.
- Melakukan pendalaman informasi dan kegiatan intelijen untuk memastikan target penyidikan 2025
- Melaksanakan intensifikasi penindakan
- Meningkatkan capaian 5W + 1H pada kegiatan intelijen melalui diskusi dan diseminasi
- Pembuatan check-list administrasi penindakan (penyusunan berkas perkara)
- Melaksanakan koordinasi ke BBPOM di Bandar Lampung, Korwas Poldallampung, dan korwas di tingkat kabupaten

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 69. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum ada	Menetapkan PIC laporan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	April 2025	Menunjuk Rizki Aprilia, S.H. sebagai PIC Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025	Menentukan topik pembahasan laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	Sudah ada PIC laporan Analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
Laporan Profiling hasil Patroli Siber dilaporkan “Nihil” pada TW 1	Melaksanakan profiling dari hasil patroli siber pada TW 2	Juni 2025	Melaksanakan profiling terhadap hasil patroli siber di bulan April	-	-	Sudah ada 1 (satu) laporan profiling untuk dilaporkan di bulan April
Belum maksimalnya pelaporan dan penginputan data rawan kasus di TW 1	Memastikan peta rawan kasus diisi dengan optimal pada TW 2	Juni 2025	Memastikan peta rawan kasus diisi dengan optimal pada TW 2	Memastikan peta rawan kasus diisi dengan optimal pada TW 3	September 2025	Total laporan rawan kasus di TW 2 sejumlah 23
Belum ada pembinaan ataupun peringatan dari BPOM Tulang	Melakukan pembinaan dan pemberian peringatan kepada akun-	Mei 2025	Membuat inovasi “Bertaring” untuk melakukan pembinaan	Melakukan pembinaan dan pemberian peringatan kepada akun-akun yang	Agustus 2025	Belum ada pembinaan ataupun peringatan dari BPOM Tulang

Bawang kepada akun-akun yang terjaring di data patroli siber	akun yang terjaring di hasil patroli siber		dan peringatan terhadap akun-akun yang terjaring di patroli siber.	terjaring di hasil patroli siber		Bawang kepada akun-akun yang terjaring di data patroli siber
Laporan profiling masih belum mendalam dan belum cukup data untuk diproses ke penyidikan	Meningkatkan kualitas patroli siber sehingga bisa didapatkan target-target yang layak untuk diprofil	September 2025	-	Meningkatkan kualitas patroli siber sehingga bisa didapatkan target-target yang layak untuk diprofil	September 2025	Laporan profiling masih belum mendalam dan belum cukup data untuk diproses ke penyidikan

3.1.7. Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW I	Kriteria
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7					-	-

Sasaran kegiatan 7 yaitu layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dilingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Balai POM

Cara Perhitungan Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tulang Bawang

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik:

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup <i>(Dengan Catatan)</i>
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik <i>(Dengan Catatan)</i>
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada Triwulan II belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP), nilai capaian indicator ini akan didapatkan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan ke-4.

Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 74. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Indeks pelayanan Publik 2025 belum tercapai	1. Pembagian breakdown dan timeline PIC (perkomponenUPP) 2. Rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil penilaian 3. Monev pelaksanaan rencana (per TW) 4. Peningkatan Kompetensi (diseminasi) utntuk PIC baru	September 2025	-	-	-	-
Indeks pelayanan Publik 2025 belum tercapai	1. Melaksanakan perencanaan untuk sosialisasi kepada eksternal untuk pelaksanaanllayana n berdering	September 2025	1. Pembagian breakdown dan timeline PIC (perkomponenU PP) 2. Rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil penilaian 3. Monev pelaksanaan rencana (per TW) 4. Peningkatan Kompetensi (diseminasi) utntuk PIC baru	-	-	-

3.1.8 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian TW II	Kriteria
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	Nilai AKIP Balai POM di Tulang	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Balai POM	-	-	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi RB	25	28,85	115,40	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8					115,40	

Sasaran kegiatan 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang, Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang, Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang, dan Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang.

1. Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas

kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Balai POM dilingkungan BPOM

Penjumlahan 4 (empat) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	25
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Pada Triwulan II belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang, nilai capaian indikator ini akan didapatkan setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat II pada triwulan IV.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 75. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 76. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	77,22	-	-	Perlu Upaya Keras	

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai AKIP belum terukur dikarenakan belum dilakukannya desk terkait penilaian SAKIP pada tahun 2025. BPOM di Tulang Bawang mendapatkan nilai 76,22 dari penilaian di tahun 2024 dikarenakan terdapat komponen yang belum memenuhi standar penilaian seperti nilai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi akuntabilitas dan capaian kinerja. Pada awal tahun 2025 telah dilakukan penyusunan rancangan renstra 2025-2029 yang akan digunakan unit kerja sebagai panduan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dan

capaiannya telah dilakukan evaluasi setiap bulan dan dilaporkan melalui aplikasi simetris

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian nilai AKIP adalah:

- Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi penilaian SAKIP pada tahun 2024
- Melakukan monitoring pemenuhan dokumen terhadap komponen penilaian sakip
- Melakukan crosscheck data inputan hasil capaian kinerja

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 77. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja nilai AKIP Balai POM Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan belum ada capaian kinerja untuk indikator ini dan belum ada penggunaan biaya dalam pencapaian target indikator ini.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim Triwulan I diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang belum memiliki nilai capaian

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP 2024

f. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 78. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Capaian indikator belum terukur	Melakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP 2024	April	Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP 2024	-	-	Sedang dilakukan proses penilaian hasil tindak lanjut atas rekomendasi SAKIP (SAPA APIP)
Capaian indikator belum terukur	Melakukan pemenuhan data pada LKE SAKIP	TW 3	-	-	-	-
Belum dilakukan kesesuaian data capaian kinerja oleh ai	Pembuatan nota dinas kepada ai untuk melakukan kesesuaian data capaian kinerja	September				

2. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antarallain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Pada Triwulan II belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Nilai AKIP Balai POM di Tulang Bawang, nilai capaian indikator ini akan didapatkan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 79. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi Triwulan IIdengan Target Tahun 2025

Tabel 80. Perbandingan Realisasi Triwulan IIdengan Target Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	77,22	-	-	Perlu Upaya Keras	

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan ukuran kualitas pelaksanaan anggaran, mencakup evaluasi perencanaan dan penggunaan APBN. NKA digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan satuan kerja dalam melaksanakan anggaran, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesesuaian dengan perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai tersebut dapat dicapai setiap bulan. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Nilai tersebut dapat dicapai di akhir tahun.

Dalam mencapai target kinerja, sampai dengan Triwulan II Balai POM di Tulang Bawang memaksimalkan setiap nilai indikator penilaian IKPA, yaitu :

1. Revisi DIPA (nilai 100), dilakukan tepat waktu sesuai periode revisi DIPA dan tidak lebih dari 1 kali revisi
2. Deviasi Hal. III DIPA (nilai 100), dilakukan konsistensi realisasi anggaran dari RPD yang telah ditetapkan dengan maksimal deviasi < 5%.
3. Penyerapan anggaran (nilai 100), realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target proporsi anggaran per triwulan
4. Belanja kontraktual (nilai 100), daftar kontrak sesuai timeline
5. Penyelsaian tagihan (nilai 100), dilakukan penyelesaian tagihan tepat waktu
6. Pengelolaan UP dan TUP (nilai 100), dilakukan revolving UP 100% min 1 kali setiap bulannya
7. Capaian output (nilai 0,00), penginputan dilakukan pada bulan april 2025

Untuk memaksimalkan nilai EKA pada akhir tahun 2025, Balai POM di Tulang Bawang akan meningkatkan nilai efisiensi SBK pada KRO QCD sebagai penunjang nilai efisien SBKK.

Terdapat blokir pagu anggaran di tahun 2025 sejumlah Rp.1.856.565.000,- yang terdiri dari belanja barang (52) sejumlah Rp.786.975.000,- dan belanja modal (53) sejumlah Rp.1.069.590.000,-. Keseluruhan dari total belanja modal mengalami pemblokiran anggaran pada KRO CAB, CAN, CBV.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan terhadap perencanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun.

2. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan POA dengan target penyerapan anggaran, serta melakukan pembaharuan RPD setiap triwulan.
3. Melakukan revisi anggaran untuk dapat mengoptimalkan sisa anggaran yang masih ada.
4. Meningkatkan nilai efisiensi SBK

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 81. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang	0,00	-1,00	Tidak Efisien

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang diperoleh nilai -1,00 sehingga untuk tingkat efisiensi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang masuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena pada Triwulan II belum seluruh anggaran digunakan untuk pencapaian target kinerja.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim Triwulan II diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang belum memiliki nilai capaian

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Menyelesaikan penginputan capaian output pada SAKTI

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 82. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Capaian indikator belum terukur	Melakukan monitoring atribut pengendalian daftar risiko	Juli	-	-	-	-
Capaian indikator belum terukur	Melakukan penyusunan daftar risiko semester 1 dan pelaporan pada SAPA APIP	Januari	Telah dilakukan penyusunan daftar risiko semester I tahun 2025 an pelaporan pada SAPA APIP	-	-	Pelaporan daftar risiko semester I tepat waktu

3. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- a) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- b) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko

- c) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada Triwulan II belum ada nilai capaian untuk indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang, nilai capaian indikator ini akan didapatkan setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Utama.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Tabel 83. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-	-

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 84. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	2,9	-	-	Perlu Upaya Keras	

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk meningkatkan nilai capaian indeks manajemen resiko, maka Balai POM di Tulang Bawang perlu melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II yaitu :

1. Memastikan agar perencanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko dapat dilaksanakan sesuai rencana.
2. Melakukan identifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis unit kerja.
3. Menyusun dan menetapkan proses penilaian risiko melalui metode yang dapat dipertanggung-jawabkan seperti membuat kertas kerja penentuan level kemungkinan dan dampak untuk seluruh risiko.
4. Melakukan review terhadap identifikasi risiko dengan menetapkan uraian *risk event* yang spesifik, akar masalah penyebab risiko, serta akibat/dampak yang dapat ditimbulkan.
5. Melakukan penilaian risiko residu sesuai dengan simpulan efektifitas pengendalian.
6. Melakukan dan mendokumentasikan pengujian aktivitas pengendalian terhadap seluruh risiko inheren dengan level ≥ 16 .

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja perlu dilakukan perencanaan pengembangan kompetensi terkait manajemen risiko dan memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana serta dilakukan evaluasi

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 85. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan belum ada capaian

kinerja untuk indikator ini dan belum ada penggunaan biaya dalam pencapaian target indikator ini.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja laporan kinerja interim Triwulan I diperoleh informasi bahwa target indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang belum memiliki nilai capaian

i. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

- Melakukan monitoring pengendalian terhadap daftar risiko

j. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 86. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Capaian indikator belum terukur	Melakukan monitoring atribut pengendalian daftar risiko	Juli	-	-	-	-
Capaian indikator belum terukur	Melakukan penyusunan daftar risiko semester 1 dan pelaporan pada SAPA APIP	Januari	Telah dilakukan penyusunan daftar risiko semester I tahun 2025 an pelaporan pada SAPA APIP	-	-	Pelaporan daftar risiko semester I tepat waktu

4. Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}}{\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang	50	54,81	109,62	

Nilai Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan II adalah 28,85 % dengan capaian kinerja 115,40 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Tahun 2025 Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori	Warna
Persentase implementasi rencana	100	54,81	109,62	Tercapai	

aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang					
--	--	--	--	--	--

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 54,81 % terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Tercapai”. Kinerja di triwulan selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan indikator ini sampai dengan triwulan II yakni terlaksananya rencana aksi :

1. Pimpinan telah menunjukkan dukungan terhadap program RB, baik melalui sosialisasi, pemberian arahan, maupun keterlibatan langsung dalam program AoC. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga semangat perubahan dilingkungan UPT.
2. Terdapat 6 area perubahan yang mendukung IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh capaian realisasi sebagai berikut :
 - a. Manajemen Perubahan dengan realisasi mencapai 71,43%
 - b. Penguatan Tata laksana dengan realisasi mencapai 50%
 - c. Penguatan Manajemen SDM dengan realisasi mencapai 50%
 - d. Penguatan Akuntabilitas dengan realisasi mencapai 62,5%
 - e. Penguatan Pengawasan dengan realisasi mencapai 50%
 - f. Peningkatan Pelayanan Publik dengan realisasi mencapai 54,5%

3. Terlaksanakannya program AoC dengan realisasi mencapai 50% dengan program sebagai berikut :

- a. PenDaKI (PEgawai cerDas, Kreatif, dan Inovatif) telah terlaksana pada bulan Juni
- b. TeRKABUL (Teman ceRdas, Kami Bangga, Uploadllagi) telah terlaksana pada bulan Juni
- c. KaWaL AkSi (KAmi pegaWAi toLAK gratifikaSI) telah terlaksana setiap bulan yaitu bulan Januari - Juni
- d. JUS CERI (Jum'at Sehat CERiA) telah terlaksana setiap bulan yaitu bulan Januari - Juni
- e. FOR KOPI (FORum KOnsultasi Publik) telah terlaksana pada bulan April namun capaian target dilaksanakan pada bulan Desember
- f. PESERTA POM (PEndampingan SERTifikasi dan PendaftARAN Produk Obat dan Makanan) telah terlaksana pada bulan Juni

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Monitoring Renja ZI Tahun 2025
- b. Monitoring program AoC Tahun 2025
- c. Kegiatan AoC yang akan berjalan selanjutnya yaitu:
 - 1. Pendaki akan melaksanakan pengumuman pendaftaran inovasi pada TW III
 - 2. Terkabul akan melaksanakan pengumuman pada TW III
 - 3. Kawal AKSI dan JUS CERI akan melaksanakan programnya setiap bulan

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

Tabel 89. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang

Indikator Kinerja	IE	TE	% Capaian TE
Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang	-	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang belum dapat dihitung dikarenakan belum ada penggunaan biaya dalam pencapaian target indikator ini.

f. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan capaian RB berfungsi sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan dan pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif. Serta menjadi salah satu syarat penting dalam persiapan menuju Zona Integritas (ZI), membantu instansi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berkualitas pelayanan publik yang prima. Dengan demikian, laporan capaian RB tidak hanya menunjukkan hasil kerja, tetapi juga menjadi alat pengukur keberhasilan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

g. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Membuat SK pedoman/Mekanisme Penentuan TIM RB

h. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 90. Matriks Tindak lanjut Tahun 2025 Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup Balai POM di Tulang Bawang

Kondisi awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir (bulan berjalan)
			Rekomendasi yang sudah selesai	Belum		
				Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
Renja belum sesuai dengan LKE ZI	Menyusun Renja LKE ZI	Juni 2025	-	Menyusun Renja LKE ZI	September 2025	Telah disusun pembaharuan renja ZI menyesuaikan LKE ZI namun belum dilakukan pembuatan timeline oleh masing-masing POKJA
Belum adanya Prosedur/Pedoman penentuan TIM RB	Membuat SK pedoman/Mekanisme Penentuan TIM RB	September 2025	-	-	-	-

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.400.367.000 (pagu awal) / Rp 2.543.802.000 (pagu setelah *Blokir*).

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp 581494471 (13,21 %) terhadap pagu awal atau (22,86 %) terhadap pagu setelah *Blokir*, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91. Realisasi dan Capaian Anggaran Triwulan II Per Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=e/d \times 100$	g	H	$i=h/g \times 100$
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	99,54	126,8	Rp101.449.000	30.057.020	29,63%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33	Rp69.364.300	17.483.230	25,20%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,80	Rp8.131.800	2.056.851	25,29%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Rp3.821.900	1.028.425	26,91%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	35,14	117,13	Rp13.039.800	8.489.850	65,11%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Rp271.800	0	0
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Rp21.764.400	3.768.650	17,32%

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,75	101,8	116,01	Rp127.138.900	21.786.854	17,14%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91,92	108,14	Rp54.488.100	9.337.223	17,14%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,2	98	111,11	Rp15.600.000	1.104.600	7,08%
2	Menguatnya Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan laboratorium	8	9,5	105,56	Rp126.741.000	57.686.950	45,52%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	35	95	271,43	Rp12.683.000	3.520.000	27,75%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,16	95,59	110,94	Rp119.413.000	33.105.809	27,72%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	45	75	166,67	Rp87.243.000	5.330.000	6,11%
		Jumlah desa pangan	75	75	100,00	Rp136.160.000	13.460.000	9,89%

		aman						
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	75	75	100,00	Rp90.429.000	9.855.690	10,90%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	Rp100.953.000	16.526.198	16,37%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Rp65.409.000	1.768.000	2,70%
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp51.128.000	5.006.480	9,79%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp5.430.000	Rp0,00	0
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	Rp3.177.770.000	941.196.708	29,62%
		Indeks Manajemen Risiko UPT	-	-	-	Rp5.478.000	0	0
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	50	54,81	109,62	Rp6.460.000	0	0

Tabel 92. Realisasi dan Capaian Anggaran Triwulan II Per Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	21,43%	Rp65.409.000	Rp1.768.000	Rp1.768.000
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	7	3	49,57%	Rp51.128.000	Rp5.006.480	9,79%
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	147	127	86,39%	Rp85.698.000	Rp24.145.809	28,18%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	Rp158.000.000	Rp18.911.109	11,97%
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21	8	38,09%	Rp33.715.000	Rp8.960.000	26,58%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	Rp50.000.000	Rp0	0,00%
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	0	0	Rp55.000.000	Rp0	0,00%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0	Rp964.590.000	Rp0	0%
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0	Rp126.741.000	Rp57.686.950	45,52%
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Bawang	1	0	0	Rp100.953.000	Rp16.526.198	16,37%
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0	Rp87.243.000	Rp5.330.000	6,11%
12	Desa Pangan Aman	1	0	0	Rp136.160.000	Rp13.460.000	9,89%
13	Pasar Pangan Aman Berkas Komunitas	1	0	0	Rp90.429.000	Rp9.855.690	10,90%
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1	0	95%	Rp12.683.000	Rp3.520.000	27,75%
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	128	51	39,84%	Rp81.318.000	Rp20.568.506	25,29%
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	155	72	46,45%	Rp101.449.000	Rp30.057.020	29,63%

17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21	7	33,33%	Rp23.196.000	Rp3.967.000	17,10%
18	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	189	78	41,27%	Rp209.107.000	Rp40.520.177	19,38%
19	Layanan BMN	1	0	0	Rp8000.000	0	0%
20	Layanan Perkantoran	1	0	0	Rp1.959.548.000	Rp922.285.599	46,87%

Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Tulang Bawang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Balai POM di Tulang Bawang telah menyusun Rencana Strategis 2025-2029. Tahun 2025 merupakan periode awal renstra 2025-2029. Diawali dengan tersusunnya Rencana Kinerja tahunan yang memuat sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tahunan. Dan ini menjadi acuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Tulang Bawang Tahun Anggaran 2025 yang memuat 8 Sasaran Kegiatan dan 23 Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

Tabel 93. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Delapan Sasaran Strategis yang diukur pada Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	% Capaian TW II	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	115,45	
2	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	105,56	
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	119,16	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	271,43	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	-	-

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang	100	
7	Layanan Publik Balai POM di Tulang Bawang yang prima	-	-
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Kelola Pemerintah Unit Organisasi Balai POM di Tulang Bawang yang optimal	109,62	

Dari hasil Sasaran Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut.

- Capaian indikator Sasaran Kegiatan Pertama sebesar 115,45 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang pada Triwulan II Tahun 2024 telah berjalan dengan baik
- Capaian indikator Sasaran Kegiatan Kedua sebesar 105,56 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini dikarenakan laboratorium Balai POM di Tulang Bawang telah berhasil mencapai target Standar Ruang lingkup, Kompetensi Personel, dan Peralatan laboratorium yang telah ditetapkan pada Triwulan I.
- Capaian indikator Sasaran Kegiatan Ketiga sebesar 119,16 % dengan kriteria “Sangat Baik”, hal ini menunjukkan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi telah berjalan dengan efektif di Triwulan II Tahun 2024
- Capaian indikator Sasaran Kegiatan Keempat sebesar 271,43 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, hal ini disebabkan karena tahapan pendampingan UMKM telah dilaksanakan pada tahap 2 dan tahap 4.
- Capaian indikator Sasaran kegiatan kelima belum memiliki capaian, hal ini dikarenakan masih dalam tahap penyelidikan dan pengumpulan target yang berpotensi dilakukan penindakan.

- f) Capaian indikator Sasaran kegiatan keenam sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tulang Bawang telah berjalan dengan baik melalui pelaporan patroli siber dan profiling telah dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.
- g) Capaian indikator Sasaran kegiatan ketujuh belum memiliki capaian karena Nilai Indeks Pelayanan Publik akan dievaluasi Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan ke-4
- h) Capaian indikator Sasaran kegiatan kedelapan sebesar 109,62 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, pada Triwulan II Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan baik, sedangkan Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Resiko akan dievaluasi oleh pusat pada triwulan IV 2025.

Pada tahun 2025 Balai POM di Tulang Bawang mendapatkan anggaran sebesar Rp 4.400.367.000 (pagu awal) / Rp 2.543.802.000 (pagu setelah *Blokir*). Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan II ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp1.182.568.538 (26,87 %) terhadap pagu awal atau (46,49 %) terhadap pagu setelah *Blokir*, dengan rincian sebagai berikut.

Balai POM di Tulang Bawang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2025.

4.2. SARAN

1. Perlu adanya cut off date untuk data disetiap akhir triwulan, agar pelaporan tepat pada waktunya dan untuk kekurangan dapat di tindak lanjuti di bulan berikutnya.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah terhadap perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja unit kerja.

3. Diperlukan adanya monitoring terkait seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja